



**GLOBAL  
FOREST  
& TRADE  
NETWORK**

# Mengekspor dalam sebuah Perubahan Lansekap Legal



George White

Sebuah panduan bagi organisasi yang saat ini ekspor, atau berniat untuk ekspor, hasil hutan ke pasar AS dan ingin menilai kinerja mereka sendiri dalam memenuhi kebutuhan pelanggan mereka di AS.

*Sebuah publikasi dari WWF's Global Forest & Trade Network*  
George White | Juni 2010

*The Global Forest & Trade Network mengucapkan terima kasih atas bantuan dari TRAFFIC dan dukungan dari the US Agency for International Development Regional Development Mission for Asia (USAID RDMA melalui Responsible Asia Forest Trade Programme (RAFT)-nya dan dari Uni Eropa.*

© 2010 WWF International.

Dokumen ini dapat direproduksi seluruhnya atau sebagian (dengan kutipan jelas), setelah mendapat persetujuan dari salah satu organisasi Mitra Pelaksana RAFT.

1	4
2	
3	

Cover 1, Page 4 © WWF-Canon / Tim Porter  
Cover 2, Page 9 © WWF-Canon / Edward Parker  
Cover 3, Page 6 © WWF-Canon / Tim Porter  
Cover 4 © WWF-Canon / Mauri Rautkari  
Page 8 © WWF-Canon / Hartmut Jungius

# DAFTAR ISI

## 4 Pendahuluan

- 4 Apa yang Dilakukan *Lacey Act*?
- 5 Apa yang Dianggap sebagai Pelanggaran *Lacey Act*?
- 5 Apa yang Terjadi pada Importir yang Melanggar Hukum di AS?

## 6 Apa Yang Diperlukan Dari Para Eksportir?

- 7 Sekilas Mengenai Hukum yang Relevan yang Perlu Dipatuhi

## 8 Apa Yang Harus Dinyatakan Dan Mengapa?

## 10 Mendemostrasikan “Due Care” (Kepedulian yang Memadai)

- 12 Organisasi-Organisasi yang Dapat Membantu
- 12 Sebuah Catatan pada Tabel Negara Tertentu
- 12 Sebuah Catatan tentang Perkembangan dalam Uni Eropa
- 12 Species yang Masuk dalam Daftar CITES
- 13 Saran untuk Eksportir

## 14 Establishing Legality

- 15 Cina
- 25 Gabon
- 30 Indonesia
- 33 Malaysia
- 39 Vietnam

# PENDAHULUAN



Panduan ini ditujukan untuk perusahaan yang saat ini mengekspor, atau berniat untuk ekspor, hasil hutan ke pasar AS. Hal ini dirancang untuk memungkinkan perusahaan untuk menilai kinerja mereka sendiri dan menawarkan saran tentang bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan pelanggan mereka di AS, yang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa produk hutan yang mereka impor telah dipanen dan diperdagangkan secara legal.

Pedoman ini juga bermanfaat bagi pelayanan kehutanan, petugas bea cukai dan pejabat pemerintah lainnya yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum dalam hukum hutan nasional dan perundang-undangan terkait yang berlaku untuk semua lapisan rantai pasokan dari panen hingga ekspor dan impor.

Pedoman ini juga merupakan referensi untuk perkembangan di pasar Eropa, terutama pasar negara-negara Uni Eropa, di mana banyak gagasan yang disarankan dalam manual ini juga akan relevan di masa depan.

## Mengapa ini Penting untuk Semua Orang yang Terlibat dalam Perdagangan Ekspor Hasil Hutan?

Pada tanggal 22 Mei 2008, Kongres AS telah mengamandemen undang-undang yang dimaksudkan untuk memberantas perdagangan hasil hutan yang berasal dari sumber ilegal, termasuk kayu dan serat kayu yang merupakan bahan baku produk (misalnya kertas). Undang-undang hasil amandemen ini dikenal dengan sebutan *Lacey Act*. *Lacey Act* menetapkan hal penting sebagai panutan dalam mengimpor berbagai jenis tumbuhan ke Amerika Serikat. Untuk sementara *Lacey Act* tidak berlaku untuk negara-negara lain, hal itu sangat penting bagi eksportir hasil hutan ke AS – sebagai pelanggan berbasis AS mengandalkan mitra perdagangan mereka untuk membantu mereka mendemonstrasikan kepatuhan terhadap hukum ini.

Sumber-Sumber informasi mengenai *Lacey Act*:

- [www.aphis.usda.gov/plant\\_health/lacey\\_act](http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act)
- [www.cbp.gov](http://www.cbp.gov)

## Apa yang Dilakukan Lacey Act?

*Lacey Act* melakukan tiga hal utama:

1. Melarang semua perdagangan tanaman atau produk tanaman – termasuk kayu dan produk-produknya – yang bersifat ilegal bersumber dari negara bagian AS mana pun atau dari negara lain.
2. Mewajibkan importir untuk melaporkan negara penghasil panen dan nama spesies dari semua kayu yang terkandung dalam produk mereka termasuk juga kuantitas, ukuran dan nilai-nya.
3. Menetapkan penalti atas pelanggaran undang-undang, termasuk berupa barang, denda atau penjara, atau penyitaan kendaraan angkutan dan peralatan dalam kasus-kasus yang paling serius, baik untuk perdagangan barang dari sumber ilegal atau memalsukan dokumentasi yang diperlukan.

## Apa yang Dianggap Sebagai Pelanggaran Lacey Act?

Ada dua komponen yang merupakan pelanggaran *Lacey Act*. Pertama, tanaman atau produk tanaman yang diambil, dipanen, diangkut atau diekspor bertentangan dengan undang-undang dasar di negara lain atau negara bagian AS. Ini merupakan tanaman dari sumber ilegal. Kedua, tanaman dari sumber ilegal ini diimpor, dibeli, dijual, diakuisisi atau diperdagangkan di wilayah AS. Hanya dalam hal yang kedua ini, transaksi atasnya, yang memicu pelanggaran terhadap UU Lacey. Penuntutan didasarkan pada bahan ilegal ada di dalam produk, yang dapat terjadi pada setiap titik dalam rantai pasokan.

## Apa yang Terjadi pada Importir yang Melanggar Hukum di AS?

Hukuman atas pelanggaran *Lacey Act* akan ditentukan berdasarkan pada tingkat pengetahuan dari perusahaan pengimpor. Perusahaan-perusahaan yang sadar terlibat dalam perilaku yang dilarang dapat dituntut dengan tuntutan tertinggi dari undang-undang termasuk denda kejahatan pidana (sampai dengan US \$500.000 untuk sebuah perusahaan, US \$250.000 untuk individu atau dua kali maksimum rugi laba dari transaksi), penjara sampai dengan lima tahun dan penyitaan barang-barang. Perusahaan yang tidak sadar terlibat dalam perilaku yang dilarang dan tidak menerapkan “*due care*” (kepedulian yang memadai) dapat dikenai denda pelanggaran pidana (sampai dengan US \$200.000 untuk perusahaan, US \$100.000 untuk individu atau dua kali maksimum rugi laba dari transaksi), mungkin dilakukan penyitaan barang atau denda hukuman sipil dari US \$ 250 sampai US \$ 10.000. Perusahaan yang telah menerapkan “*due care*” (kepedulian yang memadai) dan masih tanpa sadar terlibat dalam perilaku yang dilarang dapat disita barang-barangnya dan dikenai denda hukuman sipil. Hukuman yang tersedia terkait dengan tingkat perawatan yang diambil dan sifat kejahatan itu, dengan cakupan mulai dari pengetahuan langsung tentang perdagangan ilegal dan memalsukan pernyataan deklarasi impor hingga ke kesalahan lebih tidak disengaja. Apa yang harus jelas bagi semua eksportir adalah bahwa importir AS hampir seluruhnya bergantung pada pemasok mereka untuk membantu mereka menunjukkan “*due care*” (kepedulian yang memadai) dan di masa yang akan datang mungkin lebih suka untuk berdagang dengan orang-orang yang dapat memberikan bantuan. Semakin meningkatnya, kepatuhan hukum akan terlihat dalam kontrak antar perusahaan dan denda sipil dapat ditemukan mana terjadi pelanggaran.

## APA YANG DIPERLUKAN DARI PARA EKSPORTIR?



Importir hasil hutan berbasis AS akan mencari jaminan bahwa produk yang mereka bersumber, baik dari pasar domestik dan dari luar negeri, telah dipanen, dimiliki, diangkut, dijual atau diekspor tanpa melanggar undang-undang apapun yang relevan di negara di mana pohon itu tumbuh, bahkan jika itu diproses di negara lain.

Undang-undang, yang dianggap relevan dan yang perlu dipenuhi, termasuk yang berkaitan dengan:

1. Pencurian tanaman (kayu gelondongan);
2. Mengambil tanaman (kayu gelondongan) dari daerah resmi yang dilindungi, seperti taman atau cadangan;
3. Mengambil tanaman (kayu gelondongan) dari jenis lainnya dari “daerah yang ditetapkan secara resmi” lainnya yang diakui oleh undang-undang dan peraturan negara;
4. Mengambil tanaman (kayu gelondongan) tanpa, atau bertentangan dengan otorisasi yang diberlakukan;
5. Kegagalan untuk membayar royalti yang sesuai, pajak atau biaya yang terkait dengan tanaman panen (kayu gelondongan) itu, pengangkutan atau perdagangan; atau
6. Undang-undang yang mengatur ekspor atau pengiriman lintas, seperti larangan ekspor kayu gelondongan atau perdagangan spesies yang terancam punah (seperti CITES).

Sebuah panduan ringkas mengenai *Lacey Act* dan perdagangan produk hutan, yang dibuat oleh Environmental Investigation Agency (EIA), dapat ditemukan di:

- [www.eia-global.org](http://www.eia-global.org)

## Sekilas Mengenai Hukum yang Relevan yang Perlu Dipatuhi

Undang-undang yang relevan meliputi berbagai tahap rantai pasokan dari hutan ke tujuan ekspor. Tabel di bawah memberikan gambaran umum mengenai jenis hukum yang berlaku pada setiap tahap.

Tahapan Rantai Pasokan	Komponen <i>Lacey Act</i>	Hukum Relevan yang Perlu Dipatuhi	Contoh Kepatuhan
Hutan	Hak yang Sah untuk Memanen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencurian Tanaman (termasuk pohon atau batang kayu gelondongan);</li> <li>2. Mengambil Tanaman (termasuk pohon atau batang kayu gelondongan) dari suatu daerah yang secara resmi dilindungi, misalnya taman atau cadangan;</li> <li>3. Mengambil Tanaman (kayu gelondongan) dari "daerah yang ditetapkan secara resmi" lainnya yang diakui oleh undang-undang dan peraturan negara;</li> <li>4. Mengambil Tanaman (termasuk pohon atau batang kayu gelondongan) tanpa, atau bertentangan dengan otorisasi yang diberlakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menegakkan bahwa ada hak yang sah atau perijinan untuk memanen</li> <li>2. Memastikan bahwa panen hanya spesies yang dapat dipanen secara legal yang dipanen.</li> </ol>
Hutan	Hak yang Sah untuk Memanen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencurian Tanaman (termasuk pohon atau batang kayu gelondongan);</li> <li>2. Mengambil Tanaman (termasuk pohon atau batang kayu gelondongan) dari suatu daerah yang secara resmi dilindungi, misalnya taman atau cadangan;</li> <li>3. Mengambil Tanaman (termasuk pohon atau batang kayu gelondongan) dari "daerah yang ditetapkan secara resmi" lainnya yang diakui oleh undang-undang dan peraturan negara;</li> <li>4. Mengambil Tanaman (termasuk pohon atau batang kayu gelondongan) tanpa, atau bertentangan dengan otorisasi yang diberlakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa pemanenan dilakukan sesuai dengan izin</li> <li>2. Memastikan bahwa panen terjadi di lokasi yang telah ditetapkan dalam izin</li> <li>3. Memastikan bahwa pohon yang ditebang adalah termasuk dalam lingkup izin</li> </ol>
Hutan	Pembayaran Pajak dan Royalti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gagal membayar royalti, pajak dan biaya yang berkenaan dengan pemanenan, pengangkutan atau perdagangan tanaman (termasuk pohon dan batang kayu gelondongan) dengan sepatasnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa semua royalti, pajak atau biaya yang relevan telah dibayar oleh perusahaan pengelola hutan atau perusahaan pemanen.</li> </ol>
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan Pengangkutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum yang mengatur pengangkutan, impor, ekspor atau alat transportasi, seperti ekspor kayu gelondongan dan larangan impor kayu gelondongan.</li> <li>2. Gagal membayar royalti, pajak dan biaya yang berkenaan dengan pemanenan, pengangkutan atau perdagangan tanaman (termasuk pohon dan batang kayu gelondongan) dengan sepatasnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa semua persyaratan yang relevan telah dipenuhi selama pengangkutan kayu (termasuk dari impor) atau produk kayu dari antara hutan, tempat penggergajian, pabrik atau pelabuhan untuk mengekspor</li> <li>2. Memastikan bahwa semua royalti yang relevan, pajak atau biaya telah dibayar oleh perusahaan pengangkutan kayu gelondongan atau produk kayu</li> </ol>
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum yang mengatur impor, ekspor atau alat transportasi, seperti larangan mengekspor kayu gelondongan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa tempat penggergajian atau pabrik memiliki ketetapan hukum dan lisensi yang sesuai untuk memproses hasil hutan.</li> </ol>
Pengolahan	Pembayaran Biaya dan Royalti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gagal membayar royalti, pajak dan biaya yang berkenaan dengan pemanenan, pengangkutan atau perdagangan, impor dan ekspor tanaman (termasuk pohon dan batang kayu gelondongan) dengan sepatasnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa semua royalti, pajak atau biaya yang relevan telah dibayar oleh perusahaan pengolahan kayu</li> </ol>
Ekspor	Legalitas Perdagangan dan Ekspor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum yang mengatur impor, ekspor atau alat transportasi, seperti larangan mengekspor kayu gelondongan.</li> <li>2. Gagal mendaftarkan ekspor spesies yang tercantum dalam konvensi internasional (seperti CITES).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa perusahaan yang bertindak sebagai eksportir memiliki badan hukum dan memiliki lisensi yang tepat untuk mengekspor hasil hutan.</li> <li>2. Memastikan bahwa izin ekspor yang diperlukan lengkap, akurat dan telah tersedia</li> </ol>
Ekspor	Pembayaran Biaya dan Royalti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gagal membayar royalti, pajak dan biaya yang berkenaan dengan pemanenan, pengangkutan atau perdagangan tanaman (termasuk pohon dan batang kayu gelondongan) dengan sepatasnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa semua royalti, pajak atau biaya yang relevan telah dibayar oleh perusahaan pengekspor.</li> </ol>

## APA YANG HARUS DINYATAKAN DAN MENGAPA?



*Lacey Act* mengharuskan importir untuk memberikan pernyataan dasar yang menyertai setiap pengiriman tanaman atau produk tanaman. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk meningkatkan transparansi tentang kayu dan tanaman perdagangan dan memungkinkan pemerintah AS untuk lebih menegakkan hukum.

Pernyataan ini harus berisi:

1. Nama ilmiah dari setiap spesies yang digunakan,
2. Negara yang memanen,
3. Jumlah dan ukuran, dan
4. Nilai.

Informasi lebih lanjut tentang pernyataan ini dapat ditemukan di:

■ [www.aphis.usda.gov/plant\\_health/lacey\\_act/index.shtml](http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml)

Pernyataan tersebut dilengkapi oleh perusahaan importir. Pernyataan ini tidak menyebutkan secara spesifik mengenai legalitas dari komponen kayu dalam produk yang dinyatakan. Eksportir dapat membantu importir AS dalam memberikan informasi dasar. Importir AS akan menghadapi hukuman bila

pernyataan tidak lengkap, menyesatkan atau palsu, terlepas dari legalitas yang dinyatakan dengan baik. Oleh karena importir memiliki peran kunci dalam membantu memberikan informasi dasar yang akurat yang dibutuhkan untuk membuat pernyataan.

Membantu penyelesaian pernyataan itu sendiri saja tidak cukup. Eksportir juga harus memastikan bahwa semua hasil hutan yang akan diekspor telah sesuai dengan hukum yang relevan di negara-negara di mana kayu itu dipanen dan juga dengan undang-undang tentang pemrosesan, ekspor atau pajak di negara tempat memproses.

### Menerapkan “Due Care” (Kepedulian yang Memadai): Peran sebagai Eksportir

Importir AS perlu menerapkan “*due care*” (kepedulian yang memadai) ketika mengambil hasil hutan untuk memastikan bahwa mereka telah mematuhi *Lacey Act*. Karena “*due care*” (kepedulian yang memadai) adalah konsep fleksibel

yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu oleh sistem hukum AS. “*due care*” (kepedulian yang memadai) berarti “tingkat kepedulian di mana seseorang yang bijaksana secara layak akan menerapkannya dalam situasi yang sama atau serupa”. Akibatnya, hal itu diterapkan secara berbeda untuk berbagai kategori orang dengan berbagai tingkat pengetahuan dan tanggung jawab (Laporan Senat 97-123). Mengingat kurangnya kepastian sekitar bagaimana pengadilan bisa melihat “*due care*” (kepedulian yang memadai) sehubungan dengan ketentuan *Lacey Act*, maka akan lebih bijaksana bagi perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan produk kertas untuk menyediakan sendiri dari berbagai macam alat, teknologi dan sumber daya yang tersedia untuk menilai dan mengeliminasi kayu ilegal serangkaian rantai pasokan yang panjang dan rumit. Kebijakan intern perusahaan dan prosedur pelacakan juga merupakan elemen penting.

Langkah-langkah dapat juga termasuk bar-kode atau sistem pelacakan lain; verifikasi legalitas; sertifikasi di bawah skema

pihak ketiga; stepwise program ditawarkan oleh berbagai organisasi, penilaian diri dari resiko, dan model kemitraan publik-pribadi lainnya yang inovatif. Eksportir juga dapat mengikuti saran ini untuk memastikan bahwa mereka mengikuti “*due care*” untuk memastikan bahwa hasil hutan tersebut legal ketika bahan baku akan digunakan untuk ekspor ke pasar AS.

Menunjukkan bahwa Anda telah melakukan “*due care*” sebagai eksportir melibatkan diri dalam sejumlah kegiatan yang mengarah pada satu hasil: menjadi cukup yakin bahwa produk-produk hutan yang dipasok adalah legal. Kegiatan-kegiatan yang dapat membantu eksportir untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan “*due care*” meliputi hal-hal di bawah ini.

Eksportir perlu untuk mempertimbangkan yang mana dari kegiatan-kegiatan ini yang paling dapat membantu dan harus menyesuaikan dengan manajemen mereka untuk menyertakan beberapa (atau bahkan semua).



# MENDEMONSTRASIKAN “DUE CARE” (KEPEDULIAN YANG MEMADAI)

## 1. Mengembangkan kebijakan yang digunakan bersama-sama dengan semua pemasok dan pelanggan menyatakan bahwa hanya hasil hutan yang legal yang akan dibeli.

Sebuah kebijakan pembelian adalah alat penting dalam mendefinisikan apa yang akan dan tidak akan dibeli oleh perusahaan anda. Suatu kebijakan harus tersedia untuk umum dan ditandatangani oleh pejabat di tingkat tertinggi dalam manajemen perusahaan Anda. Sebuah kebijakan yang baik akan mendefinisikan dengan baik semua masalah, berusaha untuk menyebutkan dan mengidentifikasi apa yang diterima dan apa yang tidak diterima oleh perusahaan Anda. Sebuah kebijakan yang baik juga akan memasukkan cakupan masalah yang luas yang ingin dinyatakan perusahaan Anda di samping kepatuhan hukum sederhana.

Sebagai kemutlakan minimal kebijakan harus mencakup referensi berupa:

- Pernyataan bahwa perusahaan Anda hanya ingin membeli dan menjual hasil hutan yang telah dipanen secara legal, diangkut, diperdagangkan dan diekspor sesuai dengan hukum negara dimana kayu dipanen, diangkut, diperdagangkan atau diekspor.
- Pernyataan bahwa perusahaan Anda akan memahami dan mematuhi semua undang-undang yang relevan di negara Anda sendiri yang berlaku secara legal untuk panen, transportasi, perdagangan, pemrosesan atau ekspor hasil hutan.
- Jika Anda mengimpor hasil hutan, kebijakan perlu ditetapkan bahwa Anda akan memastikan mematuhi hukum yang relevan dari negara tempat Anda mengimpor.

## 2. Melatih staf sehingga mereka mengerti mengapa pengelolaan masalah-masalah ini penting bagi bisnis.

Ini akan menjadi ide yang baik untuk memastikan bahwa semua staf yang terlibat dalam pembelian, penjualan atau pemasaran hasil hutan memahami apa persyaratan hukum dalam negara dan untuk negara-negara di mana Anda mengimpor kayu. Sejumlah organisasi dapat menawarkan pelatihan atau nasihat tentang pelatihan dan ini harus dikonsultasikan.

## 3. Mengembangkan sistem penelusuran yang mengidentifikasi di mana produk hutan tersebut dipanen.

Semua produk hutan yang dibeli oleh perusahaan Anda harus dilacak ke hutan di mana mereka dipanen atau pabrik penggergajian primer yang memiliki sistem untuk memantau asal-usul dari semua kayu yang dibeli. Hal ini dapat menjadi tantangan jika Anda hanya mengikuti persyaratan hukum suatu negara. Di banyak negara, hukum kehutanan memiliki aturan untuk melacak dari hutan ke pabrik penggergajian, tapi masih dalam kerangka peraturan terbatas untuk melacak dari pabrik dan seterusnya. Untuk mencapai sistem “*due care*” yang efektif, beberapa bentuk teknologi pelacakan mungkin diperlukan. Database yang menunjukkan apa yang dibeli, dan mana produk itu digunakan, akan bermanfaat untuk memantau efektivitas kebijakan Anda dan memungkinkan perusahaan Anda untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan mengenai asal bahan baku Anda. Sejumlah organisasi tersedia untuk menawarkan bantuan langsung atau panduan dalam membangun sistem pelacakan.

## 4. Periksa setiap susunan bahan-bahan (sebelum dikirimkan) untuk memastikan barang tersebut telah memenuhi persyaratan minimum untuk

## menunjukkan kepatuhan hukum di negara tempat kayu itu dipanen.

Sebelum melakukan pembelian apapun, adalah bijaksana untuk memeriksa legalitas dari bahan tersebut. Memahami dokumen-dokumen apa yang harus tersedia, dan dapatkan dokumen itu sebelum membeli, dapat mengurangi ketidakpastian dan menghemat waktu. Perusahaan Anda mungkin mempertimbangkan untuk mengubah pesanan pembelian atau kontrak pembelian untuk menitikberatkan pada kebutuhan produk kayu legal. Tabel di dalam dokumen ini akan dapat membantu perusahaan Anda untuk beberapa negara. Sejumlah organisasi tersedia untuk menawarkan bantuan langsung atau panduan mengenai hal ini.

## 5. Gunakan pihak ketiga untuk memverifikasi bahwa produk-produk hutan tersebut legal (atau berkelanjutan karena hal ini biasanya meliputi legalitas juga).

Sekitar 10 persen dari hasil hutan yang diperdagangkan di seluruh dunia disertifikasi bawah berbagai skema sertifikasi. Skema-skema ini, seperti Forest Stewardship Council (FSC) dan the Programme for the Endorsement of Certification Schemes (PEFC), telah mengembangkan sistem yang menjamin pengelolaan hutan dan menyatakan bahwa kayu dari hutan ini terkandung dalam produk (sertifikasi rantai pemeliharaan atau CoC). Semua skema sertifikasi hutan, bila diterapkan di hutan, mencakup aspek legalitas (seperti hak legal untuk memanen dan legalitas dari panen), dan ketika digunakan bersamaan dengan sertifikat CoC, juga dapat menyediakan jaminan tingkat tinggi bahwa produk itu dipanen, diangkut, diolah dan diekspor secara legal.

Sejumlah organisasi tersedia untuk menawarkan bantuan langsung atau panduan berkaitan dengan sertifikasi hutan dan rantai pemeliharaan. Sistem verifikasi legal yang didesain khusus ada untuk memastikan bahwa hasil hutan dipanen, diangkut, diolah dan diekspor secara legal. Sistem ini bekerja dengan cara yang mirip dengan sertifikasi hutan dan CoC tapi memiliki fokus lebih sempit. Sejumlah organisasi tersedia untuk menawarkan bantuan langsung atau panduan terhadap verifikasi legalitas. Sebuah aspek kunci dari sertifikasi hutan, rantai pemeliharaan dan verifikasi hukum adalah bahwa penilaian kepatuhan dilakukan oleh pihak ketiga. Penilaian pihak ketiga memiliki kredibilitas yang tinggi dalam masyarakat sipil.

## 6. Tetap *up to date* dengan nasihat atau inisiatif yang dapat membantu meningkatkan proses yang dikembangkan, seperti teknologi baru, interpretasi dan perubahan undang-undang, dan kesempatan pelatihan.

Periksa asosiasi perdagangan atau departemen pemerintah yang berinteraksi dengan perusahaan Anda untuk memastikan bahwa pemahaman Anda tentang hukum dan praktik terbaiknya adalah benar dan *up to date*. Hadirlah di kesempatan pelatihan apapun yang ada dan pastikan bahwa perusahaan Anda memahami masalah hukum terkini, baik di negara Anda dan AS. Berpartisipasi dalam program-program atau inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dengan pembelian produk hutan yang bertanggung jawab. Sejumlah organisasi non-pemerintah dan asosiasi perdagangan telah mengembangkan program-program yang dirancang untuk membantu perusahaan-perusahaan melalui program bertahap untuk memperbaiki rantai suplai mereka.

## 7. Memahami apa yang merupakan kayu legal di negara Anda dan dari negara manapun Anda mengimpor kayu.

### Apa persyaratan hukum minimum untuk ekspor?

Tabel dalam panduan ini mengidentifikasi dokumen penting yang harus diperoleh dan diperiksa untuk memastikan tingkat dasar kepatuhan hukum dalam negeri, yang akan memenuhi kriteria minimum untuk memenuhi harapan pelanggan ekspor perlu disesuaikan dengan *Lacey Act*. Hanya apa legal dalam negara di mana produk hutan diekspor yang akan dapat memenuhi kebutuhan importir berbasis AS.

## Organisasi-Organisasi yang Dapat Membantu

Organisasi-organisasi berikut ini dapat menawarkan bantuan untuk semua atau beberapa proses yang disebutkan di atas:

- WWF's Global Forest & Trade Network (GFTN) — [gftn.panda.org](http://gftn.panda.org)
- TRAFFIC — [www.traffic.org](http://www.traffic.org)
- The Forest Trust (TFT) — [www.tft-forests.org](http://www.tft-forests.org)
- Tropical Forest Foundation (TFF) — [www.tropicalforestfoundation.org](http://www.tropicalforestfoundation.org)

Harap dicatat bahwa dalam daftar ini tidak semuanya disebutkan.

## Sebuah Catatan pada Tabel Negara Tertentu

Perlu diketahui bahwa tabel hanya mencakup persyaratan hukum yang sesuai dengan persyaratan *Lacey Act*. Yaitu, ekspor yang telah dipanen, dimiliki, diangkut, dijual atau diekspor tanpa melanggar undang-undang yang mendasari relevan.

Operasi legal di kebanyakan negara biasanya memerlukan kepatuhan hukum lain yang tidak langsung dimasukkan dalam daftar ini, seperti penilaian dampak lingkungan untuk pengelola hutan, atau kesehatan dan keselamatan dan peraturan sosial yang terkait dengan pengolahan kayu. Perusahaan yang mencari sertifikasi independen, seperti FSC atau verifikasi legal pihak ketiga diharapkan akan menunjukkan kepatuhan untuk mencapai standar tersebut. Oleh karena itu daftar pada tabel berikut ini merupakan daftar singkat dan tidak lengkap daftar semua peraturan perundangan yang berlaku. Lebih rinci pedoman bagi sejumlah negara-negara yang memperbolehkan verifikasi independen tersedia di situs [gftn.panda.org](http://gftn.panda.org) dan [www.traffic.org](http://www.traffic.org).

## Sebuah Catatan tentang Perkembangan dalam Uni Eropa

### Rancangan Peraturan untuk kayu ilegal

Pada saat publikasi, Komisi Eropa sedang mengembangkan Peraturan yang pada tahun 2012, akan menjadi undang-undang di semua 27 negara anggotanya. Biasanya disebut sebagai “*Due Diligence Regulation*”, peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa kayu ilegal tidak lagi diimpor ke Negara Anggota.

Peraturan baru memiliki banyak kesamaan dengan *Lacey Act* dalam ambisi keseluruhan, meski bagaimana pun mekanisme yang diatur, ditegakkan dan digunakan pasti akan berbeda-beda. Rincian yang tepat akan lebih memperhatikan sebagian besar perusahaan yang berbasis di Eropa, tapi bagi eksportir sarana untuk membantu akan sangat mirip dengan *Lacey Act*. Namun,

*Due Diligence Regulation* dapat mencakup referensi peraturan perundang-undangan tambahan yang tidak tercakup dalam lingkup *Lacey Act*.

Komisi proposal menyatakan, “pembalakan liar terjadi ketika kayu dipanen, diproses atau diperdagangkan dalam pelanggaran hukum nasional yang berlaku di negara tempat memanen.” ini mendefinisikan peraturan perundangan yang berlaku sebagai “undang-undang dari negara pemanen mengatur konservasi dan pengelolaan hutan dan pemanenan kayu serta undang-undang tentang perdagangan kayu atau produk kayu yang berkaitan dengan konservasi hutan dan pengelolaan dan pemanenan kayu.” Parlemen Eropa telah menyatakan bahwa undang-undang yang berlaku adalah “undang-undang, baik nasional, regional atau internasional, khususnya yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan, hak penggunaan sumber daya dan minimalisasi dampak lingkungan, tetapi hal itu juga harus mempertimbangkan kepemilikan properti, hak-hak masyarakat adat, undang-undang tenaga kerja dan undang-undang kesejahteraan masyarakat, pajak, bea impor dan ekspor atau biaya yang berkaitan dengan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran.”

Ada tumpang tindih yang besar antara hukum nasional bahwa *Lacey Act* mengharuskan untuk memenuhi dan mengatur hukum yang perlu dipatuhi Peraturan Uni Eropa. Eksportir yang memasok baik pasar Eropa dan AS harus berusaha untuk memahami persamaan dan perbedaan dari kedua pendekatan ini.

Tabel di dalam dokumen ini menyoroti tumpang tindih dan poin perbedaan sehubungan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Skema Perizinan FLEGT

Uni Eropa dalam serangkaian proses negosiasi bi-lateral, Perjanjian Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreements/VPA*) dengan beberapa negara produsen utama. Salah satu hasil akhir dari proses ini adalah bahwa negara produsen akan membentuk skema lisensi yang akan memberikan jaminan bahwa semua perundang-undangan yang relevan telah dipenuhi. Bahan-bahan yang memiliki ijin, dengan mandat yang sesuai, akan secara otomatis diterima sesuai dengan “*Due Diligence Regulation*” setelah peraturan itu diimplementasikan. Untuk memeriksa status proses VPA kunjungi situs ini:

- [www.illegal-logging.info](http://www.illegal-logging.info)

## Species yang Masuk dalam Daftar CITES

Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Langka Fauna dan Satwa Liar dan Flora (*The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES*) adalah respons global terhadap keprihatinan atas perdagangan

spesies langka. CITES diberlakukan pada tahun 1975, dan 160 negara telah meratifikasi perjanjian itu. CITES mengatur perdagangan binatang hidup, bagian-bagian hewan, tanaman hias, bagian-bagian tanaman obat dan jenis kayu. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi spesies terancam dan menciptakan hambatan hukum yang kuat untuk panen dan perdagangan, tergantung pada status konservasi mereka (lihat juga [www.cites.org](http://www.cites.org)). CITES mendaftar spesies terancam atau hampir punah kayu di bawah tiga klasifikasi, dikenal sebagai Lampiran. Pembatasan perdagangan dalam lampiran ini bervariasi tergantung pada sejauh mana spesies tersebut terancam punah. Daftar CITES termasuk spesies yang diperdagangkan untuk kayu, diperdagangkan untuk tujuan pengobatan dan langka, tetapi tidak merupakan spesies yang diperdagangkan secara komersial. Spesies yang tercantum di bawah ini adalah yang paling sering diperdagangkan di pasar kayu internasional.

**Catatan:** Daftar CITES adalah proses yang berkelanjutan. Silakan periksa situs WCMC (<http://www.unep-wcmc.org>) atau situs IUCN ([www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)) untuk update reguler.

### **CITES Appendix I-listed species should be avoided at all times.**

Untuk Lampiran II dan III spesies, tingkat yang harus diperlakukan dengan hati-hati-nya tinggi. Pertama, ada kewajiban hukum bagi setiap importir dan pedagang spesies ini untuk memastikan bahwa semua impor dan perdagangan terdaftar dengan otoritas terkait. Hukuman sering kali berat untuk kegagalan dalam mendaftar impor spesies yang termasuk dalam lampiran II dan III.

Pertanyaan kedua menyangkut sifat spesies terancam punah ini. Perdagangan spesies ini dapat saja dilegalkan, namun penting untuk mengenali bahwa, dalam banyak kasus, perdagangan yang telah menyebabkan kebutuhan dan persyaratan untuk pemantauan ketat. CITES mendaftar spesies yang merupakan subjek untuk dihapuskan dari perdagangan (melalui daftar dalam Lampiran I atau melalui pengurangan kuota), sehingga dalam banyak kasus tidak ada jaminan ketersediaan jangka panjang untuk spesies pada Lampiran II dan III. **Praktek terbaik dengan spesies CITES adalah untuk memonitor dari dekat status spesies yang terlibat dan memastikan bahwa semua persyaratan hukum telah dipenuhi. Yakinkanlah 100 persen dengan spesies tertentu yang sedang dibeli.**

### **Lampiran I**

Spesies dalam daftar ini menghadapi ancaman kepunahan dan dilarang dalam perdagangan komersial internasional. Perdagangan diijinkan untuk spesies artifisial yang tumbuh, produk yang dibuat sebelum spesies ditambahkan ke daftar, dan spesimen yang digunakan untuk tujuan ilmiah. **Izin diperlukan baik dari tujuan ekspor dan negara-negara pengimpor untuk memastikan bahwa contoh dari spesies ini diperoleh secara legal.**

- Alerce (*Fitzroya cupressoides*)
- Brazilian rosewood (*Dalbergia nigra*)

### **Lampiran II**

Perdagangan internasional spesies ini diperbolehkan asalkan masalah dokumen **negara asal memastikan bahwa pemanenan spesies ini dilakukan secara sah dan bahwa tidak merugikan kelangsungan hidup spesies.**

- Afrosia (*Pericopsis elata*)
- Lignum vitae (*all species of Guaiacum*)
- Cuban mahogany (*Swietenia mahagoni*)
- Bigleaf mahogany (*Swietenia macrophylla*)
- Ramin (*all species of Gonystylus*)

### **Lampiran III**

Lampiran ketiga adalah mekanisme sukarela bahwa negara manapun dapat dilibatkan untuk membantu negara dalam mengontrol panennya sendiri dan perdagangan spesies tersebut dan mencegah gerakan ilegal dimana spesies tersebut dicuci. Segera setelah spesies terdaftar (oleh negara manapun) pada Lampiran III, **semua negara pengekspor diharuskan untuk mengeluarkan sertifikat asal dengan pengiriman spesies itu. Ijin ekspor atau sertifikat diharapkan ditujukan untuk semua pihak CITES segera setelah spesies terdaftar pada Lampiran III.**

- Almendro (*Dipteryx panamensis*)
- Spanish cedar (*Cedrela odorata*)

### **Saran untuk Eksportir:**

Periksa hukum di negara Anda yang berkaitan dengan CITES dan pastikan bahwa Anda mematuhi. Kepatuhan biasanya melibatkan pendaftaran pada titik ekspor. Jika bahan yang diekspor dibuat dari spesies impor yang dilindungi oleh CITES, pastikan bahwa Anda telah memperoleh dokumen yang diperlukan pada titik impor.

*Kegunaan dokumen ini adalah untuk tujuan pendidikan dan informasi saja dan tidak dimaksudkan dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum.*

*Orang yang mencari nasihat hukum mengenai kepatuhan terhadap Lacey Act atau hukum, peraturan, atau persyaratan lainnya harus berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualitas.*

# PEDOMAN UMUM UNTUK MENENTUKAN LEGALITAS

Tabel ini memberikan gambaran untuk daerah khas yang perlu dicakup ketika mengkaji legalitas hasil hutan. Tabel berikut memberikan detail lebih untuk sejumlah negara tertentu. **Dengan tidak adanya pedoman untuk negara tertentu prinsip-prinsip umum berikut ini harus diamati.**

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Pengelola Hutan	Bukti bahwa perusahaan memiliki perjanjian yang masih berlaku dengan perusahaan yang memberikan hak untuk mengelola dan panen hutan Dengan kata lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sertifikat Otoritas Hutan</b></li> <li>• <b>Perjanjian Lisensi Pengelolaan Hutan</b></li> <li>• <b>Lisensi Kayu Hutan</b></li> <li>• <b>Izin Pengelolaan Hutan</b></li> <li>• <b>Lisensi untuk beroperasi di sektor penebangan</b></li> <li>• <b>Rencana pengelolaan yang Telah Disetujui</b></li> <li>• <b>Lisensi Pemanenan</b></li> </ul>	Semua usaha pengelolaan hutan, apakah publik, swasta atau komunitas yang dimiliki harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki hak untuk mengelola hutan dan hak untuk memanen hutan.
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Pengelola Hutan dan Perusahaan Pemanen Kayu	Bukti bahwa perusahaan resmi terdaftar dan memiliki izin yang diperlukan untuk beroperasi dalam pengelolaan hutan dan sektor penebangan.	Di banyak perusahaan, baik perusahaan pengelolaan hutan dan perusahaan pemanen diwajibkan secara hukum terdaftar untuk dapat beroperasi di sektor ini. Pendaftaran mungkin memerlukan sejumlah proses lain untuk diamati.
Hutan	Legalitas untuk Memanen	Pengelola Hutan dan Perusahaan Pemanen Kayu	Bukti bahwa perusahaan memang benar-benar melakukan pemanenan perlu menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki izin untuk memanen. Dengan kata lain meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lisensi Pemanenan Kayu</b></li> <li>• <b>Lisensi Pemanenan</b></li> <li>• <b>Rencana Pemanenan</b></li> </ul>	Di banyak negara, penebangan kayu dilakukan oleh pihak ketiga yang dipekerjakan oleh pengelola hutan untuk melakukan pemanenan.
Hutan	Pembayaran Pajak dan Royalti	Pengelola Hutan dan Perusahaan Pemanen Kayu	Bukti bahwa perusahaan telah membayar biaya atau pajak yang harus dibayarkan kepada negara atau pemerintah daerah sehubungan dengan memperoleh izin untuk mengelola atau memanen, dan biaya atau pajak yang terkait dengan volume kayu yang benar-benar panen. Dengan kata lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Biaya Reboisasi</b></li> <li>• <b>Lisensi bisnis yang masih berlaku</b></li> <li>• <b>Dokumen Pendaftaran Pajak</b></li> <li>• <b>Royalti Sumber Daya Hutan</b></li> <li>• <b>Kembalian Pajak</b></li> </ul>	Perusahaan bertanggung jawab untuk membayar pajak atau biaya kepada pemerintah nasional atau lokal (atau keduanya) untuk mengotorisasi manajemen dan pemanenan mereka.
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan Pengangkutan	Pengangkut Kayu Gelondongan dan Produk Kayu	Bukti bahwa perusahaan telah menggunakan dokumen yang diperlukan saat mengangkut kayu gelondongan atau kayu. Dengan kata lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sertifikat Pengangkutan Kayu</b></li> <li>• <b>Sertifikat Alat Pengangkut</b></li> <li>• <b>Lisensi untuk membawa kayu gelondongan atau kayu</b></li> <li>• <b>Dokumen Pengiriman Kayu</b></li> <li>• <b>Penghapusan Ijin Jalan</b></li> <li>• <b>Penghapusan Izin</b></li> </ul>	Kebanyakan negara membutuhkan pengangkutan kayu harus benar-benar berlisensi untuk tujuan ini dan bagi mereka untuk membawa dokumen yang diperlukan yang mengidentifikasi asal kayu atau kayu dan tujuan akhir dari bahan yang diangkut.

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut Kayu Gelondongan dan Produk Kayu	Bukti bahwa perusahaan telah menggunakan perangka diperlukan atau tanda saat pengangkutan kayu gelondongan atau kayu.  Dengan kata lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penanda Kayu Gelondongan</b></li> <li>• <b>Tanda Identifikasi Kayu Gelondongan</b></li> <li>• <b>Tanda Martil</b></li> <li>• <b>Cat Penanda</b></li> </ul>	Beberapa negara memiliki sistem yang sangat teratur yang memerlukan semua kayu gelondongan atau kayu gergajian yang diangkut keluar hutan untuk membawa tanda-tanda yang mengidentifikasi kayu dengan tunggul asli dimana kayu tersebut dipanen.
Pemrosesan	Legalitas Pemrosesan	Pemroses kayu gelondongan atau pabrik yang menggunakan kayu	Bukti bahwa perusahaan telah membeli lisensi yang diperlukan untuk memproses kayu gelondongan atau kayu.  Dengan kata lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lisensi untuk Beroperasi</b></li> <li>• <b>Sertifikat Pengolahan Kayu</b></li> </ul>	Sebagian besar negara mengharuskan semua pabrik penggergajian kayu, pabrik kayu lapis, produsen sekunder atau pabrik bubur kertas untuk memiliki lisensi dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
Pemrosesan	Pembayaran biaya dan royalti	Pemroses kayu gelondongan atau pabrik yang menggunakan kayu	Bukti bahwa perusahaan telah membayar biaya atau pajak yang harus dibayarkan kepada negara atau pemerintah daerah yang terkait dengan pengolahan kayu.  Dengan kata lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lisensi Bisnis yang Masih Berlaku</b></li> <li>• <b>Dokumen Pajak Pendaftaran</b></li> <li>• <b>Kembalian Pajak</b></li> </ul>	
Ekspor	Legalitas Penjualan dan Ekspor	Ekspertir Hasil Hutan	Bukti bahwa perusahaan memiliki izin yang diperlukan untuk mengekspor hasil hutan dan telah memenuhi semua persyaratan legal untuk mengekspor produk.  Dengan kata lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perusahaan memiliki izin ekspor</b></li> <li>• <b>Daftar Packing</b></li> <li>• <b>Faktur</b></li> <li>• <b>Bill of lading</b></li> <li>• <b>Formulir Pernyataan Bea Cukai</b></li> <li>• <b>Telah dibayar sesuai tarif dan ada bukti pembayarannya</b></li> <li>• <b>Kontrak Penjualan</b></li> <li>• <b>Pengiriman pesanan</b></li> <li>• <b>Pengiriman pesanan</b></li> <li>• <b>Dokumen CITES yang benar (jika dibutuhkan)</b></li> </ul>	Perusahaan ekspor diharuskan untuk memiliki liseni dalam menjalankan fungsi ini dan secara rutin harus menyediakan dokumen yang cukup untuk memungkinkan pihak berwenang di negara pengekspor dan negara pengimpor negara untuk memonitor transaksi. Beberapa negara melarang ekspor spesies atau jenis bahan tertentu (misalnya kayu gelondongan atau kayu gergajian) atau sangat mengatur volume bahan-bahan yang dapat diekspor.
Ekspor	Pembayaran Biaya dan Royalti	Ekspertir Hasil Hutan	Bukti bahwa perusahaan telah membayar sesuai tarif yang terkait dengan produk yang diekspor.  Dengan kata lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah dibayar sesuai tarif dan ada bukti pembayarannya</b></li> <li>• <b>Resi Pajak Ekspor</b></li> <li>• <b>Resi Tugas Bea Cukai</b></li> <li>• <b>Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai</b></li> </ul>	Perusahaan Ekspor diharuskan untuk membayar semua pajak dan tugas yang sesuai ketika mengekspor produk-produk hutan. Ini mungkin termasuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di beberapa negara.

*Dokumen ini adalah untuk tujuan pendidikan dan informasi saja dan tidak dimaksudkan dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum. Orang mencari nasihat hukum mengenai kepatuhan dengan Lacey Act atau hukum lainnya, peraturan, atau persyaratan harus berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualitas.*



Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	<b>Pengelola hutan dan perusahaan pemanen</b>  - Kayu dari Hutan	Perusahaan harus memegang Sertifikat Otoritas Hutan yang berlaku.  Sertifikat Otoritas Hutan dikeluarkan oleh Administrasi Kehutanan yang berotoritas di bawah Dewan Negara.	<b>perusahaan kehutanan milik negara harus memiliki dokumen investigasi dan dokumen desain untuk wilayah panen dan diberi tanda terima, oleh Administrasi Kehutanan yang relevan dengan sertifikat dari regenerasi hutan untuk daerah panen pada tahun sebelumnya.</b>  <b>entitas panen lain harus memiliki dokumen-dokumen yang menggambarkan tujuan, tempat, jenis, situasi hutan, cakupan, cadangan, sarana pemanenan dan langkah-langkah untuk regenerasi pohon-pohon.</b>
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	<b>Pengelola hutan dan perusahaan pemanen</b>  - Kayu dari tanah yang dikonversi	Perusahaan harus memegang Sertifikat Otoritas Hutan yang berlaku; DAN perusahaan harus memiliki dokumen persetujuan resmi yang mengizinkan konversi penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh Administrasi Kehutanan yang relevan	Individu harus memiliki dokumen-dokumen yang menggambarkan daerah, cakupan, jenis, volume dan periode regenerasi dll
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	<b>Pengelola hutan dan perusahaan pemanen</b>  - Kayu dari Lahan Pertanian	Petani dapat memverifikasi legalitas panen ketika mereka memiliki dokumen-dokumen sertifikasi yang disetujui oleh komite desa mereka.	Individu harus memiliki dokumen-dokumen yang menggambarkan daerah, cakupan, jenis, volume dan periode regenerasi dll
Hutan	Legalitas untuk Memanen	<b>Pengelola hutan dan perusahaan pemanen</b>  - Kayu dari Hutan  - Kayu dari tanah yang dikonversi	perusahaan kayu, dan pemanenan harus memiliki Lisensi Pemanenan Kayu ("Sertifikat Penerimaan Pemanenan Kayu") yang dikeluarkan oleh Administrasi Kehutanan yang relevan	Perusahaan bertanggung jawab untuk membayar pajak atau biaya kepada pemerintah nasional atau lokal (atau keduanya) untuk mengotorisasi manajemen dan pemanenan.
Hutan	Legalitas untuk Memanen	<b>Pengelola hutan dan perusahaan pemanen</b>  - Kayu dari Lahan Pertanian	Petani dapat memverifikasi legalitas panen ketika mereka memiliki dokumen-dokumen sertifikasi disetujui oleh komite desa mereka.	
Hutan	Pembayaran Biaya dan Royalti	<b>Pengelola hutan dan perusahaan pemanen</b>	Perusahaan harus membayar pajak pertambahan nilai di mana PPN yang tepat dikenakan pada hampir semua kayu gelondongan yang dijual (tergantung ukuran). Biaya reboisasi dikumpulkan oleh pemerintah. Resi dari instansi terkait merupakan bukti.	pajak hutan semua terkait seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya reboisasi, dan biaya untuk pertanian khusus dibayar dan tepat waktu

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen <i>Lacey Act</i>	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut Swasta	Operator Kayu/pengemudi truk harus memiliki "pengangkutan kayu/sertifikat penyerahan " yang valid yang diterbitkan oleh Administrasi Kehutanan pada atau di atas tingkat kabupaten.	
Pengangkutan	Hak Legal untuk Memanen	Pengangkut Pemerintah	Pembawa yang bekerja pada pemerintah/ pengemudi truk harus membawa dokumen konsinyasi kayu yang komprehensif, tetapi tidak memerlukan sertifikat "transportasi kayu "	
Pengangkutan	Hak Legal untuk Memanen	Pengangkut	<b>dokumen konsinyasi kayu digunakan selama transportasi dan harus lengkap dan benar.</b>	dokumen konsinyasi kayu harus dikeluarkan oleh otoritas yang benar dan harus menunjukkan kondisi penerbitan, seperti volume, jenis material dan asal.
Pengangkutan	Legalitas untuk Memanen	Pengangkut -Perjalanan antar propinsi	Setiap pengiriman harus disertai dengan Sertifikat Karantina Tumbuhan	Sertifikat Karantina memberikan rincian tentang apa yang sedang diangkut, asal dan tujuan.
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Pengolah	Perusahaan pengolahan kayu memegang sertifikat pendaftaran bisnis yang dikeluarkan oleh otoritas perdagangan industri dan administrasi.	Industri pengolahan kayu secara hukum terdaftar sesuai dengan undang-undang
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Pengolah - di daerah hutan	Industri pengolahan kayu memegang sertifikat pengolahan kayu yang diterbitkan oleh Administrasi Kehutanan di atas tingkat kabupaten.	Perusahaan pengolahan kayu harus memegang Sertifikat Pengolahan Kayu yang berlaku.
Pengolahan	Pembayaran Biaya dan Royalti	Pengolah	Perusahaan harus membayar pajak pertambahan nilai yang sesuai.  Resi dari instansi terkait merupakan bukti.	Semua pajak terkait dengan operasi pengolahan kayu dibayar tepat waktu
Pengolahan	Tidak Berlaku	Pengolah	Periksa bahwa perusahaan memelihara atau memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal / masyarakat adat sesuai dengan hukum dan peraturan.  Mencari konfirmasi bahwa:  Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama bagi pekerjaannya termasuk tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja dari kelompok khusus	Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft " <i>Due Diligence Regulation</i> " Uni Eropa.  Tenaga kerja tidak boleh didiskriminasikan atas dasar kelompok etnis, ras, gender dan agama. Ketentuan khusus untuk mempekerjakan orang-orang cacat, orang-orang yang termasuk kelompok etnis minoritas dan pensiunan tentara harus diamati, jika ada. Perusahaan dilarang untuk mempekerjakan remaja dan anak-anak di bawah usia 16 tahun sebagai buruh, kecuali bagi orang-orang dengan keterampilan khusus.



Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Pengolahan	Tidak Berlaku	Pengolah	<p><b>Periksa apakah perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan tentang karyawan dan hak-hak pekerja dan kesejahteraan.</b></p> <p>Mencari konfirmasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan memastikan waktu kerja, istirahat dan hari libur bagi karyawan</li> <li>Remunerasi jam kerja pada hari libur wajib</li> <li>Perusahaan membayar gaji karyawan dan manfaat yang sepadan dengan jam kerja dan kinerja terkait</li> <li>Perusahaan telah menerapkan prosedur keselamatan yang jelas, dan menjamin sanitasi tenaga kerja seperti yang ditentukan oleh peraturan</li> <li>Perusahaan harus memberikan perlindungan khusus bagi perempuan dan karyawan kecil (muda)</li> <li>Perusahaan harus menawarkan pelatihan profesional yang sesuai</li> </ul>	Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft "Due Diligence Regulation" Uni Eropa.
Ekspor	Legalitas Penjualan dan Ekspor	Eksportir	<p><b>Validitas dan pengesahan dokumen dan sertifikat yang relevan yang dibutuhkan oleh pihak berwenang sebagaimana mestinya,</b></p> <p>untuk mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>daftar packing</li> <li>Faktur</li> <li>Bill of lading</li> <li>Formulir Pernyataan Bea Cukai</li> <li>Telah dibayar sesuai tarif dan ada bukti pembayarannya</li> <li>Kontrak Penjualan</li> <li>Pengiriman pesanan</li> <li>Verifikasi pengiriman uang (Administrasi Pengendalian Bursa)</li> <li>Pengiriman pesanan</li> </ul>	Dokumen dan sertifikat terkait harus disampaikan oleh perusahaan impor dan ekspor yang bersangkutan sesuai hukum dan peraturan.
Ekspor	Legalitas Penjualan dan Ekspor	Eksportir	<p><b>Sertifikat karantina</b> baik untuk produk impor dan ekspor kehutanan dikeluarkan oleh masing-masing <b>Inspeksi Masuk dan Keluar pelabuhan dan Badan Karantina.</b></p>	Semua Dokumen Inspeksi Karantina Ekspor dan Impor dan prosedur telah diikuti.
Ekspor	Legalitas Penjualan dan Ekspor	Eksportir – spesies CITES	<p><b>Sertifikat Impor dan ekspor</b> dari otoritas lokal yang bertanggung jawab terhadap hewan liar dan tanaman dari pemerintah provinsi, daerah otonom dan kotamadya secara langsung di bawah pemerintah pusat dengan dokumen-dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrak impor atau ekspor</li> <li>Nama produk, jenis, jumlah dan tujuan impor atau ekspor tanaman langka (dan produk dari tanaman tersebut dan/atau derivat-nya)</li> </ul>	Pernyataan kondisi pada spesies yang terdaftar dalam CITES dan jenis pohon yang dilindungi oleh katalog perlindungan negara (dan produk dan/atau derivat-nya) dengan persyaratan khusus telah diikuti.
Ekspor	Pembayaran Biaya dan Royalti	Eksportir	<p><b>Bukti penerimaan resmi</b> harus tersedia untuk audit. Perusahaan Impor dan ekspor seharusnya menunjukkan pembayaran PPN Ekspor dan Pajak Konsumsi Kayu</p>	Semua pajak terkait dengan ekspor dan impor hasil hutan dibayar tepat waktu. Pajak ekspor dikenakan untuk lantai kayu solid dan sumpit kayu sekali pakai.

*Dokumen ini adalah untuk tujuan pendidikan dan informasi saja dan tidak dimaksudkan dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum. Orang mencari nasihat hukum mengenai kepatuhan dengan Lacey Act atau hukum lainnya, peraturan, atau persyaratan harus berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualitas.*

# CONTOH DOKUMEN KUNCI

## Lisensi Pemanenan Kayu (“Sertifikat Pendaftaran Pemanenan Kayu”)

(LOGO: Lencana Manajemen Pemanenan Kayu dari Biro Kehutanan)

<b>(tahun) jumlah panen</b>					
Setelah audit Investigasi & Desain Dokumen di Daerah Penebangan atau Aplikasi Pemanenan yang disediakan oleh ( ), aktivitas pemanenan di kabupaten/daerah pusat kehutanan/desa dan kota/jalan kompartemen(desaja/jalan) sub kompartemen (blok/lokasi tanah) (sebelah timur sebelah selatan sebelah barat sebelah utara) ) <b>disetujui.</b>					
Hutan asal pemanenan		Spesies hutan		Spesies Pohon (grup)	
Kedudukan Alami		Nomor Sertifikat Hak Hutan			
Jenis Penebangan		Sistem Pemanenan		Intensitas Penebangan	%
Daerah penebangan	Hectar (atau jumlah penebangan dalam batang pohon : )				
Volome penebangan	Meter Kubik				
yang mana	Kayu Komersial	Meter Kubik (volume output m3)			
	Kayu In-House	Meter Kubik			
	Kayu Bakar	Meter Kubik			
Periode Penebangan	dari	tahun bulan tanggal	kepada	tahun bulan tanggal	
Periode regenerasi	tahun bulan tanggal		Sistem Regenerasi		
Regenerasi Spesies Kayu			Daerah Regenerasi	Hectar (atau jumlah penebangan dalam batang pohon: )	
Departemen pengelolaan (stempel)		Departemen yang mengeluarkan sertifikat (stempel)		Staff yang mengeluarkan sertifikat	
Tanda tangan pemilik sertifikat		Tanggal penerbitan sertifikat	tahun	bulan	tanggal

Catatan:

- 1) Sertifikat ini dihasilkan dalam rangkap tiga. Copy pertama tetap dipegang oleh Administrasi Kehutanan, yang kedua merupakan milik pemohon, salinan ketiga digunakan untuk menyertai kayu yang diangkut.
- 2) Sertifikat ini hanya berlaku untuk tanggal yang ditentukan.



# 重点国有林区林木采伐许可证

№ 0425965

柴河 (20 07) 柴采字第 710 号

根据 2007-1-03 提报的伐区调查设计文件或采伐申请, 经审核, 批准  
 在三块石 044 002 003 林场 林班 作业区 小班采伐。

林分起源: 天然林 林种: 用材林 树种: 色木

权 属: 国有 林权证号: 128

采伐类型: 主伐 采伐方式: 择伐 采伐强度: 17.4 %

采伐面积: 12.10 公顷(或采伐株数: 508 株)

采伐蓄积: 276.0 立方米

其中: 商品材: 276.0 立方米(出材量: 223.0 立方米)

烧 材: 6.0 立方米

采伐期限: 自 2007 年 2 月 6 日至 4 月 1 日 更新期限: 9 年 9 月 0 日

更新树种: 更新面积: 6.00 公顷(或更新株数: 株)

二联 申请者存根



发证机关(章)



发证日期: 2007 年 2 月 6 日

发证人员(章)



- 注: 1、此证一式三联。一联为发证机关存根, 二联为申请者存根, 三联为林木采伐凭证。  
 2、超过规定采伐期限, 此证无效。  
 3、采伐凭证联套印国家林业局林木采伐管理专用章。

## Sertifikat Karantina Tumbuhan (Off Province)

Stempel dari Administrasi Kehutanan Negara

Hutan ( ) pengecekan No. 000XXXX

Alokasi dan organisasi pengangkutan (orang), dan alamat					
Nama alokasi dan organisasi pengangkutan (orang)		No.identitas		Telepon	
Organisasi (orang) yang mengantarkan, dan alamat					
Rencana/asal produk tanaman				Pengangkutan	
Sumber dan tujuan pengangkutan	dari	oleh		kepada	
Masa berlaku	dari	tahun	bulan	tanggal	hingga tahun bulan tanggal
Nama tumbuhan/ produk tumbuhan	Nama produk (spesies kayu)	spesifikasi	organisasi	volume	komentar
<p>Penerbitan komentar: Tanaman/produk tanaman yang tercantum di atas, melalui ( ) Hama di karantina kehutanan, hama komplementer di provinsi lokal (daerah / kota) dan memasuki provinsi (daerah / kota), dan hama berbahaya lain dalam kehutanan yang dikarantina organisasi kehutanan diajukan dalam memasuki propinsi tidak ditemukan, sehingga alokasi dan transportasi disetujui.</p> <p>Organisasi yang dipercaya (stempel khusus organisasi penerbitan karantina kehutanan) (stempel khusus organisasi tanaman pada tingkat propinsi)</p> <p>Petugas karantina(tanda tangan)</p> <p>Tanggal penerbitan: tahun bulan tanggal</p>					

Catatan:

- 1) Semua stempel yang relevan dibutuhkan.
- 2) Sertifikat tidak dapat digunakan kembali, dipindahkan atau diubah dengan cara apapun.
- 3) Satu sertifikat harus menemani satu kendaraan (atau kapal) untuk selama perjalanan yang disebutkan.



Plant Quarantine Certificate



植物检疫证书 (省内)



(14)

林( )检字 N<sup>o</sup> 02203596

调运单位(人)及地址		江苏省泗阳县(江苏省泗阳县)			
调运(承办)人姓名	身份证号	联系电话			
收货单位(人)及地址	江苏省镇江市丹阳市(江苏省镇江市丹阳市)				
植物或植物产品来源	运输工具				
运输起讫	自	经	至		
有效期限	自	年	月	日至	年
植物或植物产品名称	品名(或材种)	规格	单位	数量	备注
松子松	散板	多杉木	立方米	24	松子
(以下空白)					
签发意见: 上述调运的植物或植物产品, 经( ) 未发现林业检疫性有害生物和本省(区、市)补充林业检疫性有害生物, 同意调运。					
签发机关(植物检疫专用章)		检疫员(签名)			
发证日期		2008年02月02日			

第二联随货同行

注: 1. 本证无调出地林业植物检疫机构检疫专用章和检疫员签名无效; 2. 本证转让、涂改和重复使用无效; 3. 一车(船)一证, 全程有效。



# Timber Transportation / Conveyance Certificate

----- 裁 ----- 切 ----- 线 -----

## 江苏省省内木材运输证



江苏省( )市( )县( )区( )

00633725

发证依据	育林证号: 0161027				
木材产地	江苏	省(区、市)	泗阳县(市、区) 镇(林场)		
发货单位(人)	江苏省泗阳县				
收货单位(人)	江苏省丹阳市				
运输方式	汽车				
运输起讫	自(泗阳)经( )至(丹阳市)县(市、区)				
有效期限	从 贰零壹捌 年 贰 月 贰 日至 贰零壹捌 年 肆 月 肆 日 过期作废				
树(材)种	品 名	规 格	数 量		备 注
			件(根、张、块)数	材 积 (m³)	
樟子松	单板	2000	2000	20.6	
	(以下空白)				
	(以下空白)				
	(以下空白)				
合计(大写) 贰 万 零 千 百 零 十 零 件(根、张、块); 贰 千 零 百 零 十 点 肆 立方米					
 江苏省林业管理局 管理机关专用章 木材运输管理专用章		 泗阳县林业管理局 木材运输专用章		签发日期: 贰零壹捌年 贰月 贰日 申领人: <u>李凯</u>	签证人: <u>李凯</u>

第二联 随货同行

注: 1、本证由起运地县级以上林业主管部门盖章有效; 2、一车(船)一证, 证货相符, 全程有效; 3、不准涂改、买卖、转让或重复使用; 4、运达本证规定地点的木材, 需再次转运的, 应凭本证在当地林业主管部门重新办理出省(省内)木材运输证; 5、发证依据是指注销的林木采伐许可证(或者上市销售证明)和育林基金票据号码, 或者运入本县、市木材的原运输证号码。



Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Perusahaan Pengelola hutan / perusahaan pemanen	Konfirmasikan bahwa perusahaan memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perijinan perdagangan dan properti</li> <li>• garansi bank</li> <li>• Lisensi yang valid</li> <li>• Nomor Identifikasi Pajak (NIF)</li> <li>• Perusahaan terdaftar dengan Kantor Jaminan Sosial Nasional (CNSS).</li> <li>• Resi Pembayaran kontribusi penerimaan pajak pengusaha dengan kata lain dibayar oleh perusahaan untuk asuransi keamanan sosial lokal untuk pekerjanya</li> <li>• Perusahaan mengadakan perjanjian profesional dan / atau pemegang saham perusahaan harus memperoleh otorisasi dari administrasi hutan untuk mendirikan sebuah perusahaan yang beroperasi di hutan.</li> </ul>	Perusahaan harus terus memegang pendaftaran berlaku secara ekonomi, sosial dan otoritas kehutanan.
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Perusahaan Pengelola hutan / perusahaan pemanen	Konfirmasikan bahwa pemegang konsesi telah miliki sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lisensi panen</li> <li>• pengelolaan hutan sementara / panen / pengolahan perjanjian</li> <li>• rencana pengelolaan hutan yang disetujui atau ketetapan alokasi.</li> </ul>	Perusahaan harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi untuk beroperasi dalam batas waktu yang diperlukan oleh hukum dan peraturan
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Perusahaan Pengelola hutan / perusahaan pemanen	Konfirmasi bahwa perusahaan memiliki dokumen-dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Operasi Tahunan (PAO) yang telah diisi disetujui</li> <li>• lisensi operasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah otoritas kehutanan</li> <li>• Kuasa dan lisensi dari pihak berwenang administratif lainnya.</li> </ul>	Perusahaan harus memegang lisensi panen tahunan yang dikeluarkan oleh administrasi kehutanan dan izin yang diperlukan lainnya (certaines autorisation pour agir sur le rencana lokal) dari penguasa ekonomi lokal.
Hutan	Legalitas untuk Memanen	Perusahaan Pengelola hutan / perusahaan pemanen	Konfirmasikan bahwa perusahaan telah mengikuti prosedur perencanaan sah dan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki rencana pengelolaan hutan yang disetujui</li> <li>• rencana industrialisasi</li> <li>• Persetujuan atas rencana yang berbeda oleh otoritas administrasi kehutanan yang relevan.</li> </ul>	<p>Pengelolaan kehutanan harus memiliki rencana pengelolaan yang telah disusun sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan oleh administrasi kehutanan.</p> <p>Catatan: rencana pengelolaan hutan yang dikembangkan oleh orang yang berwenang atau perusahaan meliputi parameter seperti penebangan tahunan, siklus pemotongan, perlakuan silvikultur, daftar spesies yang boleh ditebang dan diameter minimum yang diijinkan untuk dipanen dari masing-masing spesies.</p>

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Hutan	Legalitas untuk Memanen	Perusahaan Pengelola hutan / perusahaan pemanen	Konfirmasi keberadaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana lima tahunan</li> <li>Rencana operasional tahunan</li> <li>Surat rencana yang disetujui oleh otoritas pengelolaan hutan yang relevan.</li> </ul>	Rencana operasional lima tahunan dan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan administrasi kehutanan.  Catatan: Setiap konsesi hutan harus memiliki rencana pengelolaan hutan yang meliputi 30 tahun, yang membagi wilayah tersebut menjadi enam kompartemen. Untuk setiap kompartemen rencana lima-tahun harus dikembangkan dan kompartemen masing-masing lebih jauh lagi dibagi dalam coupe tahunan dimana rencana operasional tahunan harus dikembangkan sebelum penebangan diotorisasi. Isi yang diperlukan setiap jenis program ini dimasukkan dalam Kode Hutan.
Hutan	Legalitas untuk Memanen	Perusahaan Pengelola hutan / perusahaan pemanen	Tunggul pohon yang dipanen ditandai dengan dipalu atau dicat sesuai dengan persyaratan peraturan	Semua pohon yang ditujukan untuk pemanenan harus ditandai dengan dipalu dan tunggul harus ditandai dengan cara yang sama dengan kayu berasal dari pohon. Palu untuk menandai pohon khusus untuk setiap perusahaan dan terdaftar oleh administrasi kehutanan dan otoritas peradilan.
Hutan	Pembayaran Biaya dan Royalti	Perusahaan Pengelola hutan / perusahaan pemanen	Konfirmasi kembalian pajak telah ditandatangani oleh administrasi kehutanan.	Kembalian pajak atas produksi kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hutan	Tidak Berlaku	Pengelola Hutan / Perusahaan Pemanen	Periksa bahwa perusahaan mempertahankan atau memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal / masyarakat adat sesuai dengan hukum dan peraturan. Mencari konfirmasi bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kompensasi yang dibayarkan sebagai akibat dari kerusakan kepada masyarakat di mana property berada</li> <li>Pekerja disewa dari masyarakat lokal / masyarakat adat dibayar sesuai dengan ketentuan hukum</li> <li>iuran keuangan tersebut dibayar pada waktu yang tepat untuk organisasi pembangunan lokal yang mungkin diperlukan sesuai dengan persyaratan dan kondisi kontrak</li> <li>Hak-hak masyarakat lokal yang merupakan penggunadiakui dan dihormati</li> </ul>	Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft "Due Diligence Regulation" Uni Eropa. Perusahaan penebangan kayu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah tempat mereka beroperasi. Kontribusi mereka untuk pembangunan daerah harus dilakukan secara finansial. Jumlah iuran tersebut akan ditentukan dalam perjanjian kontrak tambahan yang dilampirkan pada rencana pengelolaan.
Hutan	Tidak Berlaku	Hutan / Perusahaan Pemanen	Periksa bahwa perusahaan tersebut mengakui legalitas atau hak-hak adat dari masyarakat adat / masyarakat lokal sesuai dengan hukum dan peraturan. Mencari konfirmasi bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengguna hak-hak masyarakat lokal dalam konsesi kehutanan diakui dan dihormati</li> </ul>	Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft "Due Diligence Regulation" Uni Eropa.

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen <i>Lacey Act</i>	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Konfirmasikan bahwa peraturan dihormati melalui penggunaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kartu abu-abu</li> <li>• bernomor pelat</li> <li>• kartu asuransi</li> </ul>	Truk dan kendaraan transportasi lainnya untuk hasil hutan memiliki izin pendaftaran dan nomor yang valid.  Catatan: semua kendaraan harus didaftarkan oleh Departemen Transportasi di tempat dimana mereka mendapatkan nomor plat dan kartu identifikasi abu-abu. Nomor pelat harus disebutkan dalam kartu asuransi.
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Konfirmasikan bahwa peraturan dihormati oleh perusahaan yang memiliki otorisasi yang berlaku untuk transportasi khusus.	Lisensi transportasi untuk produk hutan adalah valid dan <i>up to date</i> .  Catatan: truk yang mengangkut kayu dan produk kayu lain harus mendapatkan otorisasi "untuk transportasi khusus" dari Menteri transportasi. otorisasi tersebut harus diperbaharui setahun sekali. Truk mengangkut kayu yang diizinkan untuk beredar hanya pada pukul 5:30-11:30 dan 14:00-18:30.
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Konfirmasikan bahwa semua billet ditandai dengan benar.	Billet kayu di pekarangan hutan ditandai sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mereka dapat dengan mudah dilacak.  Tanda yang sama dibuat pada tunggul dengan palu terdaftar harus dilakukan pada setiap billet dari pohon yang sama sehingga untuk memudahkan identifikasi selama transportasi.
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Konfirmasikan bahwa pengemudi truk kayu gelondongan memiliki lembar transportasi kayu gelondongan.	Dokumen pengangkutan kayu gelondongan diselesaikan sebelum pemberangkatan dari tempat pemanenan dan dibawa selama pengangkutan.  Catatan: selama pengangkutan, sopir truk penebangan perlu untuk membawa lembar pengangkutan kayu gelondongan yang memberikan informasi yang memungkinkan kayu gelondongan dapat dilacak hingga ke lokasi penebangan.
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Pengolah	Konfirmasikan bahwa perusahaan memiliki rencana industrialisasi disetujui oleh Menteri yang bertanggung jawab atas hutan dan administrasi kehutanan.	Konfirmasikan bahwa peraturan dihormati melalui bukti-bukti dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• catatan pemanenan kayu (laporan resmi dari coupe panen tahunan)</li> <li>• laporan pengolahan kayu gelondongan</li> </ul>
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Pengolah	Konfirmasikan bahwa peraturan dihormati melalui bukti-bukti dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• catatan pemanenan kayu (laporan resmi dari coupe panen tahunan)</li> <li>• laporan pengolahan kayu gelondongan</li> </ul>	Perusahaan menyimpan bukti bahwa kuota pengolahan telah dihormati. Catatan: Perusahaan harus memproses sekurang-kurangnya 75% dari volume panen di negara ini.
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Pengolah	Konfirmasikan bahwa peraturan yang dihormati oleh bukti-bukti dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Triwulanan kayu gelondongan yang diterima</li> <li>• Laporan tahunan.</li> </ul>	Input dan output volume pabrik dicatat sesuai dengan prosedur resmi. Catatan: perusahaan yang terlibat dalam penebangan hutan dan pengolahan kayu harus mencatat semua kayu gelondongan yang masuk pabrik pengolahan, dan menyerahkan laporan kepada pemerintah hutan (Inspektorat Provinsi) secara triwulan dan tahunan.

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Pengolahan	Pembayaran Biaya dan Royalti	Pengolah	Konfirmasikan bahwa perusahaan tetap menyimpan entri kayu gelondongan dan daftar produk keluar.	Kembalian pajak pengolahan kayu sesuai dengan aturan dan peraturan. Perusahaan-perusahaan diminta untuk menyimpan daftar yang mencatat entri kayu gelondongan dan produk keluar yang diproses di setiap pabrik.
Pengolahan	Tidak Berlaku	Pengolah	Periksa bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan tentang karyawan dan hak-hak pekerja Mencari konfirmasi bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan menghormati kebebasan para pekerja untuk berpartisipasi dalam kegiatan serikat pekerja</li> <li>wakil Para pekerja 'telah dilatih secara tepat untuk melaksanakan tugasnya</li> <li>Para karyawan perusahaan memiliki akses ke informasi yang relevan yang terkandung dalam UU Ketenagakerjaan</li> <li>Hubungan antara perusahaan dan karyawan telah dibakukan berkenaan dengan ketentuan hukum</li> </ul>	Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft " <i>Due Diligence Regulation</i> " Uni Eropa.  Undang-undang mengatur keberadaan komite perwakilan untuk setiap kelompok pekerja sama dengan atau melebihi 10 orang.
Pengolahan	Tidak Berlaku	Pengolah	Periksa bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan karyawan perusahaan dan kesejahteraan pekerja Mencari konfirmasi bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan pekerja dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk sektor aktivitas mereka</li> <li>Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengalihan pekerja</li> <li>Sanitasi dan kondisi keamanan bagi pekerja sesuai dengan undang-undang dalam hal kekuatan</li> <li>Jam kerja yang diterapkan oleh perusahaan mematuhi ketentuan hukum</li> </ul>	Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft " <i>Due Diligence Regulation</i> " Uni Eropa.
Pengolahan	Tidak Berlaku	Pengolah	Periksa bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan karyawan perusahaan dan kesejahteraan pekerja Mencari konfirmasi bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan pekerja dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk sektor aktivitas mereka</li> <li>Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengalihan pekerja</li> <li>Sanitasi dan kondisi keamanan bagi pekerja sesuai dengan undang-undang dalam hal kekuatan</li> <li>Jam kerja yang diterapkan oleh perusahaan mematuhi ketentuan hukum</li> </ul>	Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft " <i>Due Diligence Regulation</i> " Uni Eropa.

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
<b>Ekspor</b>	<b>Legalitas Penjualan dan Ekspor</b>	<b>Eksportir</b>	Konfirmasikan bahwa peraturan dihormati dengan bukti lisensi ekspor / impor perusahaan.	Perusahaan memiliki lisensi ekspor / impor.  Catatan: setiap perusahaan yang terlibat dalam ekspor produk kayu harus memegang izin ekspor yang dikeluarkan oleh Departemen perdagangan dan diperpanjang setiap tahunnya.
<b>Ekspor</b>	<b>Legalitas Penjualan dan Ekspor</b>	<b>Eksportir</b>	Konfirmasikan bahwa peraturan dihormati dengan bukti lembar spesifikasi ekspor produk hutan yang disetujui.	Perusahaan memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk ekspor / impor produk kayu sesuai dengan peraturan resmi.  Catatan: untuk mengekspor produk kayu perusahaan harus mengisi lembar rincian spesifikasi semua produk kayu yang diekspor mulai dari jenis, kualitas dan kuantitas. Lembar spesifikasi harus diserahkan kepada otoritas kehutanan yang tepat untuk persetujuan. Persetujuan untuk selebar spesifikasi yang telah disampaikan tergantung pada bukti pembayaran semua pajak.
<b>Ekspor</b>	<b>Legalitas Penjualan dan Ekspor</b>	<b>Eksportir</b>	Konfirmasikan bahwa peraturan dihormati oleh bukti-bukti dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• laporan tahunan dan triwulanan pemanenan kayu</li> <li>• catatan ekspor kayu gelondongan.</li> </ul>	Perusahaan menghormati kuota ekspor kayu gelondongan.  Catatan: perusahaan penebangan tidak harus mengekspor lebih bahwa 25% dari volume panen.
<b>Ekspor</b>	<b>Legalitas Penjualan dan Ekspor</b>	<b>Eksportir</b>	Konfirmasikan bahwa peraturan dihormati berdasarkan bukti-bukti dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pernyataan yang sesuai dengan CITES</li> <li>• Daftar spesies yang memiliki otorisasi dalam rencana pengelolaan hutan.</li> </ul>	Semua jenis kayu yang diekspor diotorisasi oleh lembaga tepat dan peraturan yang sesuai dengan peraturan yang ada.  Catatan: tampaknya tidak ada daftar khusus dari jenis kayu yang dilindungi di tingkat nasional selain dari konvensi CITES (Gabon adalah sebuah negara penandatanganan) dan batasan yang diberikan pada setiap rencana pengelolaan hutan tertentu.
<b>Ekspor</b>	<b>Pembayaran Biaya dan Royalti</b>	<b>Eksportir</b>	Konfirmasikan bahwa semua lembar spesifikasi telah disetujui oleh administrasi air dan hutan.	Kembalian pajak perdagangan kayu dan produk impor dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

*Dokumen ini adalah untuk tujuan pendidikan dan informasi saja dan tidak dimaksudkan dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum. Orang mencari nasihat hukum mengenai kepatuhan dengan Lacey Act atau hukum lainnya, peraturan, atau persyaratan harus berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualitas.*

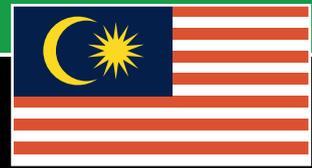


Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Semua pengelola hutan dan perusahaan panen termasuk dioperasikan masyarakat	<p>Konfirmasikan bahwa perusahaan dapat menunjukkan kepemilikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ijin otorisasi</li> <li>• SK PKH (SK penetapan kawasan hutan)</li> <li>• HPH dan IUPHHK-HA, untuk hutan alam;</li> <li>• HPHTI dan IUPHHK-HT, untuk hutan perkebunan.</li> <li>• pemilik tanah Swasta wajib menyelenggarakan Sertifikasi Tanah yang sah (sertifikat tanah)</li> </ul>	<p>Harus ada pendaftaran legal atas unit pengelolaan hutan yang jelas, didokumentasikan dan mutlak dengan otorisasi untuk kegiatan tertentu.</p> <p>HP: Hutan Produksi (Hutan Produksi Tetap)                      HPHTI: Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Ijin Hutan Tanaman Industri)                      HPH: Hak Pengusahaan Hutan (Ijin Pengelolaan Hutan Alam)                      HT: Hutan Tanaman (tanaman hutan)                      HTI: Hutan Tanaman Industri (Hutan Tanaman Industri)                      IUPHHK: ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Hutan Kayu Produk Ijin Eksploitasi)                      IPK: ijin Pemanfaatan Kayu (Ijin Konversi Lahan)</p>
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Semua pengelola hutan milik swasta atau milik negara dan perusahaan penebangan, termasuk kayu dari kawasan hutan konversi	<p>Konfirmasikan bahwa perusahaan memiliki ijin yang valid, lisensi atau instrumen serupa.</p> <p>Perusahaan harus memegang salah satu ijin panen berikut (sebagaimana berlaku): Untuk pengelolaan hutan alam dan perkebunan Rencana Kerja Tahunan (RKT / bagan kerja) telah secara resmi disetujui oleh pejabat yang berwenang yang relevan dan menunjukkan tanah dan LHC (persediaan pra-panen) dan pemetaan pohon telah disahkan oleh Dinas Kehutanan.</p> <p>Di mana kayu dipanen pada lahan pribadi, pemilik harus memegang IPK yang valid.</p>	<p>Perusahaan harus memiliki otorisasi untuk melakukan panen dalam unit manajemen hutan.</p> <p>RKT: Rencana Kerja Tahunan</p> <p>IPK: ijin Pemanfaatan Kayu (Ijin Konversi Lahan)</p>
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Pengelola Hutan / Perusahaan Pemanen	<p>Konfirmasikan bahwa dalam kasus operasi hutan milik komunitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lisensi dokumen bisnis untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada hutan negara.</li> <li>• bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</li> <li>• Dokumen kesepakatan komunitas tentang pengelolaan hutan oleh lembaga masyarakat (termasuk lembaga masyarakat hukum tradisional).</li> </ul>	<p>Dalam kasus komunitas pengelolaan hutan mengoperasikan lahan hutan negara perusahaan (komunitas) harus memiliki ijin untuk mengelola hutan negara.</p>
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Hutan milik komunitas	<p>Konfirmasikan bahwa perusahaan / masyarakat melakukan kegiatan pemanenan sesuai dengan klasifikasi penggunaan lahan yang legal untuk unit pengelolaan hutan.</p>	<p>Bukti harus ada bahwa kawasan pengelolaan hutan secara legal diklasifikasikan untuk jenis penggunaan lahan atau kegiatan komersial yang dilakukan.</p>

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Semua pengelola hutan milik pribadi atau milik negara dan perusahaan pemanen	Konfirmasikan bahwa perusahaan memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana pengelolaan hutan yang telah disetujui.</li> <li>Rencana operasi atau panen yang ada telah disetujui saat ini.</li> <li>Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah secara resmi disetujui oleh otoritas pemerintah yang tepat.</li> <li>Buku Ukur (BU) dan LHP telah diotorisasi</li> <li>Ijin untuk memanen spesies yang masuk daftar CITES harus didokumentasikan.</li> <li>Unit manajemen telah memperoleh dokumen AMDAL yang telah disetujui secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencakup seluruh area kerja.</li> <li>Volume panen dalam batas wewenang target produksi tahunan (JPT)</li> </ul>	Rencana pengelolaan hutan harus disetujui oleh otoritas yang relevan dengan kewenangan tahunan dan dokumentasi yang terkait.  <b>LHP:</b> Laporan Hasil Produksi (laporan produksi)  <b>AMDAL:</b> Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL dan rencana mitigasi)  <b>JPT:</b> PMDN Jatah Tahunan (target produksi tahunan)
Hutan	Pembayaran Biaya dan Royalti	Semua pengelola hutan dan perusahaan panen termasuk dioperasikan masyarakat	Konfirmasikan bahwa perusahaan memegang hal berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisensi bisnis yang masih berlaku</li> <li>dokumen pendaftaran pajak</li> </ul>	Perusahaan harus memiliki nomor pendaftaran wajib pajak / formulir dan ijin usaha yang berlaku untuk beroperasi dalam yuridiksi.
Hutan	Pembayaran Biaya dan Royalti	Semua pengelola hutan dan perusahaan panen termasuk dioperasikan masyarakat	Konfirmasikan bahwa perusahaan memiliki bukti pembayaran penuh dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dana Reboisasi (DR)</li> <li>Royalti Sumber Daya Hutan (PSDH).</li> </ul>	Perusahaan pengelolaan hutan secara rutin harus memenuhi semua kewajiban pajak; biaya dan / atau pembayaran royalti yang terkait dengan pemeliharaan hak yang sah untuk memanen dan volume panen diizinkan.  <b>DR:</b> Dana Reboisasi (Dana Reboisasi)  <b>PSDH:</b> Pajak Sumber Daya Hutan (Royalti Sumber Daya Hutan)
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Konfirmasikan bahwa perusahaan pada saat pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan (konsesi) ke luar hutan telah memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>SKSKB</li> <li>FA-KB</li> </ul> <p>Kayu gelondongan milik perusahaan harus memiliki tanda fisik permanen yang berisi informasi yang memadai untuk melacak kembali ke blok panen.</p> <p>Perusahaan harus memiliki catatan transportasi kayu di luar balong kayu gelondongan (termasuk file SKSKB / arsip dan DHH (untuk hutan alam); faktur transportasi (untuk perkebunan hutan).</p>	Perusahaan pengelolaan hutan harus memiliki prosedur dan praktek yang memberikan kontrol yang efektif terhadap hasil hutan dari kayu yang masih berdiri sampai kepemilikan dipindahkan di gerbang hutan. Jika balong kayu gelondongan atau TPK berada di dalam batas konsesi, hanya dokumen DP yang diperlukan. Jika balong kayu gelondongan atau TPK adalah di luar batas konsesi, dokumen SKSKB diperlukan.  <b>SKSKB:</b> Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (Dokumen pengangkutan Kayu Bulat)  <b>FA-KB:</b> Faktur Angkutan Kayu Bulat (Faktur untuk Mengangkut Kayu Bulat)  <b>DHH:</b> Daftar Hasil Hutan

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Pengolah	Konfirmasikan bahwa perusahaan memegang surat-surat berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lisensi bisnis yang masih berlaku</li> <li>• dokumen pendaftaran pajak</li> </ul>	Perusahaan harus memiliki nomor pendaftaran wajib pajak / formulir dan ijin usaha yang masih berlaku untuk beroperasi dalam yurisdiksi. Persetujuan untuk industri pengolahan kayu dengan kapasitas output bulanan kurang dari 6.000 m3 atau dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah.  Untuk industri pengolahan kayu dengan kapasitas output bulanan lebih dari 6.000 m3, persetujuan harus diperoleh dari Departemen Kehutanan.
Pengolahan	Pembayaran Biaya dan Royalti	Pengolah	Konfirmasikan bahwa perusahaan telah melunasi seluruh pajak yang relevan dan biaya yang terkait dengan kegiatan berlisensi tersebut.	Perusahaan pengolahan secara rutin harus memenuhi semua kewajiban pajak, biaya dan / atau pembayaran royalti yang terkait dengan kegiatan pengolahan kayu.
Ekspor	Legalitas Penjualan dan Ekspor	Eksportir	Konfirmasikan bahwa perusahaan memegang surat-surat berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lisensi bisnis yang masih berlaku</li> <li>• dokumen pendaftaran pajak</li> </ul>	Perusahaan harus memiliki nomor pendaftaran wajib pajak / formulir dan ijin usaha yang masih berlaku untuk beroperasi dalam yurisdiksi.
Ekspor	Legality of Sale and Export	Eksportir	Konfirmasikan bahwa perusahaan dapat menyediakan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bill of Lading</li> <li>• Surat Keterangan Asal yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan</li> <li>• daftar pengemasan untuk kayu gergajian</li> <li>• catatan rantai pemeliharaan yang mengindikasikan kayu gelondongan mana yang digunakan untuk memproduksi kayu</li> <li>• SKSKB file</li> <li>• DHH (untuk hutan alam)</li> <li>• Faktur pengangkutan (untuk hutan perkebunan).</li> <li>• lisensi untuk mengekspor spesies yang termasuk dalam daftar CITES (untuk spesies CITES)</li> </ul>	Perusahaan harus memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk ekspor atau impor produk kayu sesuai dengan peraturan resmi.  Secara umum: Semua ekspor kayu dari Indonesia dilarang, karena itu, setiap kayu gelondongan diidentifikasi berasal dari Indonesia, keluar Indonesia, telah diperoleh secara ilegal. Departemen Kehutanan dan Departemen Perdagangan dan Industri mengeluarkan keputusan bersama. 350/ Menhut-VI/2004 & 598/MPP/ Kep/9/2004, 24 September 2004, yang menyatakan bahwa ekspor kayu gergajian untuk semua jenis dilarang mulai dari tanggal ditetapkannya. Keputusan ini telah dikeluarkan untuk melindungi industri pengolahan kayu domestik.
Ekspor	Legalitas Penjualan dan Ekspor	Eksportir	Konfirmasikan bahwa perusahaan memiliki ijin ekspor yang valid.	Perusahaan harus memiliki ijin ekspor yang valid

*Dokumen ini adalah untuk tujuan pendidikan dan informasi saja dan tidak dimaksudkan dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum. Orang mencari nasihat hukum mengenai kepatuhan dengan Lacey Act atau hukum lainnya, peraturan, atau persyaratan harus berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualitas.*



Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Perusahaan pemanenan di dalam hutan cadangan	<p><b>Semenanjung Malaysia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekaman gazettement dari Cadangan Hutan Permanen (PRF);</li> <li>• Rekaman klasifikasi PRFs;</li> <li>• Hak Perusahaan perjanjian, dan</li> <li>• Ijin Untuk Mengambil Produk Hutan serta ijin terkait lainnya seperti yang berlaku: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ijin masuk</li> <li>• Ijin Jalan</li> <li>• Ijin menggunakan</li> <li>• Catatan cadangan penduduk asli</li> <li>• Catatan daerah penduduk asli</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Sabah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisensi Kesepakatan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</li> <li>• Lisensi Kesepakatan pengolahan kayu jangka panjang</li> <li>• Semua keputusan yang relevan dengan hak masyarakat adat asli di Pengadilan Sipil</li> </ul> <p><b>Sarawak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisensi Kayu Hutan</li> <li>• Hibah, sewa, hak penduduk adat asli dan cadangan komunal asli</li> <li>• Keputusan Pengadilan Sipil berkaitan dengan legalitas atau kepemilikan adat atau penggunaan hak</li> </ul>	Bukti lisensi, ijin dan dokumen lain mengenai pemberian hak untuk memanen, mengekstrak atau mengeksploitasi kayu di hutan
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Pemanenan perusahaan di luar hutan cadangan	<p><b>Semenanjung Malaysia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan atau lisensi panen dari otoritas kehutanan</li> </ul> <p><b>Sabah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan atau lisensi panen dari otoritas kehutanan</li> <li>• Formulir 2 (b) ijin atas tanah terasing</li> <li>• Formulir 1 lisensi</li> </ul> <p><b>Sarawak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisensi OT</li> </ul>	Ketersediaan dokumentasi status hukum dalam kasus tanah yang tidak di dalam hutan cadangan permanen atau wilayah pengelolaan hutan dan tunduk pada pembukaan hutan untuk penggunaan non-perhutanan.

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Perusahaan pemanenan di dalam hutan cadangan	<p>Dokumen-dokumen ini harus diadakan dan disetujui:</p> <p><b>Semenanjung Malaysia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Pengelolaan Hutan</li> <li>• Rekaman pemantauan Departemen Kehutanan</li> <li>• Rekaman batas-batasnya</li> <li>• AMDAL</li> <li>• Rekaman tindakan mitigasi yang diambil</li> </ul> <p><b>Sabah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Pemanenan</li> <li>• Pedoman Perencanaan Pengelolaan Hutan</li> <li>• Rekaman pemantauan Departemen Kehutanan</li> <li>• Rekaman batas-batasnya</li> <li>• Rencana Pengelolaan Hutan</li> <li>• AMDAL</li> <li>• rencana pemanenan komprehensif</li> </ul> <p><b>Sarawak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur untuk mengidentifikasi dan membatasi daerah sensitif</li> <li>• Rencana Detil Pemanenan</li> <li>• Rekaman pemantauan Departemen Kehutanan</li> <li>• Rekaman batas-batasnya</li> <li>• Rencana Pengelolaan Hutan</li> <li>• Lisensi Kayu</li> </ul>	Dokumen rencana pengelolaan hutan telah disusun sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan oleh administrasi hutan dan jelas menunjukkan pelaksanaan pedoman dan / atau prosedur untuk mengidentifikasi dan menentukan batas daerah sensitif untuk perlindungan tanah dan air, sumber air dan lahan basah.
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Perusahaan pemanenan di dalam hutan cadangan	<p>Dokumen-dokumen ini harus diadakan dan disetujui:</p> <p><b>Semenanjung Malaysia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekaman produk kayu, jenis dan kuantitas panen di bawah lisensi</li> <li>• laporan luas panen triwulan</li> <li>• Laporan Kepatuhan</li> </ul> <p><b>Sabah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• catatan harian penebangan</li> <li>• Laporan kemajuan triwulan</li> <li>• Laporan Kepatuhan</li> <li>• Rekaman buku Kompartemen</li> <li>• Perjanjian Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan</li> </ul> <p><b>Sarawak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data jumlah dan jenis kayu dipanen dalam wilayah pengelolaan hutan</li> <li>• Data enumerasi</li> <li>• Laporan Kepatuhan</li> </ul>	Diameter minimum yang dapat dipanen dihormati selama operasi penebangan, spesies kayu yang dipanen diberi otoritas oleh rencana pengelolaan hutan, dan kuantitas tegakan sisa dipertahankan, mengambil tanggung jawab dari keberlanjutan mereka dalam jangka panjang sesuai dengan persyaratan peraturan, kondisi lisensi dan pedoman yang sesuai.
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Perusahaan pemanenan di dalam hutan cadangan	<p>Dokumen-dokumen ini harus diadakan dan disetujui:</p> <p><b>Semenanjung Malaysia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil persediaan pasca-penebangan</li> <li>• Rekaman perlakuan silvikultur</li> <li>• Analisis perubahan hutan berdiri/ komposisi jenis versus persediaan pra-penebangan</li> </ul> <p><b>Sabah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventoryi pasca panen</li> <li>• Penutupan Laporan Inspeksi</li> <li>• Rekaman perlakuan silvikultur</li> <li>• Rekaman Plot Sampel Permanen</li> <li>• Perjanjian Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</li> </ul> <p><b>Sarawak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Pengelolaan Hutan</li> </ul>	Menunjukkan penerapan pedoman manajemen untuk menilai regenerasi alami pasca panen, dan langkah-langkah untuk melengkapi regenerasi, bila perlu.

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Hutan	Pembayaran Biaya dan Royalti	Pengelolaan hutan dan Perusahaan Pemanen	<p>Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekaman pembayaran biaya yang diperlukan, royalti, pajak dan biaya lainnya.</li> </ul> <p><b>Semenanjung Malaysia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekaman pembayaran biaya yang ditentukan secara hukum, royalti, pajak dan biaya lainnya</li> </ul> <p><b>Sabah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>struktur dan tarif royalti yang dikukuhkan</li> <li>Perjanjian Kinerja obligasi untuk Pengelolaan Hutan Lestari</li> <li>dana cess hutan komunitas</li> <li>royalti berdasarkan kelompok spesies</li> <li>Ijin Kerja</li> <li>biaya pendaftaran mesin</li> <li>Dana rehabilitasi Sarawak</li> <li>tagihan royalti di bawah Jadwal Keempat Lisensi Hutan Kayu</li> <li>Dilikuidasi kerusakan di bawah Jadwal Kelima Lisensi Hutan Kayu</li> <li>Biaya untuk lisensi dan izin untuk Jadwal Kedua Aturan Satwa Liar</li> </ul>	Perusahaan harus membayar semua biaya yang diperlukan, royalti, pajak dan biaya lainnya sebelum kegiatan penebangan.
Hutan	Tidak Berlaku	Pengelolaan hutan dan Perusahaan Pemanen	<p>Periksa bahwa perusahaan memelihara atau memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal / masyarakat adat sesuai dengan hukum dan peraturan.</p> <p>Mencari konfirmasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan mengidentifikasi hak-hak hukum dan adat masyarakat lokal dalam unit manajemen hutan.</li> </ul>	Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft "Due Diligence Regulation" Uni Eropa.
Hutan	Tidak Berlaku	Pengelolaan hutan dan Perusahaan Pemanen	<p>Periksa bahwa perusahaan memelihara atau memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal / masyarakat adat dalam sesuai dengan hukum dan peraturan.</p> <p>Mencari konfirmasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan mengidentifikasi hak-hak hukum dan adat masyarakat lokal dalam unit manajemen hutan.</li> </ul>	Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft "Due Diligence Regulation" Uni Eropa.
Pengangkutan	Legalitas Kayu Impor	Pengangkut	<p>Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisensi Impor</li> <li>Pernyataan Bea Impor Formulir 1</li> <li>Penghapusan ijin jalan</li> </ul>	Perusahaan harus memiliki dokumen resmi berlaku untuk impor kayu gelondongan
Pengangkutan	Legalitas Kayu Impor	Pengangkut	<p><b>Semenanjung Malaysia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impor lisensi yang dikeluarkan oleh MTIB untuk kayu gelondongan</li> <li>penghapusan ijin jalan (untuk kayu gelondongan) dari FD</li> <li>Formulir K1 Departemen Bea Cukai</li> <li>Formulir K3 Departemen Bea Cukai (di Malaysia)</li> </ul> <p><b>Sabah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ijin impor MTIB</li> <li>Penerimaan dari ekspor impor FD dan biaya inspeksi</li> <li>penghapusan ijin jalan (untuk kayu gelondongan) dari FD</li> <li>Formulir K1 Departemen Bea Cukai</li> <li>Formulir K3 Departemen Bea Cukai (di Malaysia)</li> </ul> <p><b>Sarawak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisensi Impor (JK 69)</li> <li>penghapusan ijin jalan dari STIDC</li> <li>Formulir K1 Departemen Bea Cukai</li> <li>Formulir K3 Departemen Bea Cukai (di Malaysia) bentuk (di Malaysia)</li> </ul>	prosedur impor dan ijin untuk kayu dan produk kayu harus sesuai dengan undang-undang

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Pengangkutan	Legalitas Kayu Impor	Pengangkut	<b>Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Petunjuk dari Menteri Primer Industri 2002 dan 2003</li> <li>Daftar pelarangan Bea Cukai</li> </ul>	Larangan impor kayu dan scantlings persegi besar (LLS) dari Indonesia.
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Dokumen-dokumen berikut harus diadakan dan disetujui:  <b>Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat pendirian perusahaan</li> <li>lisensi Departemen transportasi untuk kendaraan komersial</li> <li>Catatan Departemen Kehutanan</li> </ul>	Perusahaan harus terdaftar sebagai badan usaha dan truk dan kendaraan transportasi lainnya harus juga terdaftar sesuai dengan instansi terkait / berwenang
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Semua operator harus mampu menghadirkan hal berikut:  <b>Semenanjung Malaysia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>penghapusan ijin jalan</li> <li>penandaan atau identifikasi kayu gelondongan yang sesuai tanda palu</li> </ul> <b>Sabah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijin Pembuangan Kayu</li> <li>penandaan atau identifikasi kayu gelondongan yang sesuai tanda palu</li> <li>Penghapusan ijin jalan</li> <li>Formulir pernyataan ekspor</li> </ul> <b>Sarawak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penghapusan ijin jalan</li> <li>penandaan atau identifikasi kayu gelondongan yang sesuai tanda palu</li> </ul>	Tunggul pohon yang dipanen ditandai dengan palu atau cat penanda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Billet kayu di pekarangan hutan ditandai sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat dengan mudah dilacak. Dokumen pengangkutan kayu gelondongan yang diisi sebelum keberangkatan dari tempat pemanenan dan disimpan oleh operator selama seluruh rute pengangkutan.
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Semua Pengolah Kayu	<b>Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Pendirian Perusahaan</li> <li>Registrasi dengan MTIB dan STIDC yang sesuai</li> </ul>	Industri pengolahan kayu secara hukum terdaftar sesuai dengan undang-undang
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Semua Pengolah Kayu di Sarawak	Semua produsen Sarawak dibatasi dalam ekspor kayu gelondongan dan harus mampu menunjukkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerimaan dan tagihan penjualan</li> <li>Laporan royalti analisa catatan kayu gelondongan yang dinilai untuk pemrosesan lokal</li> <li>Laporan analisa catatan penghapusan ijin jalan</li> </ul>	Sarawak memiliki kuota pemesanan kayu gelondongan sebesar 60% produksi kayu di Negara harus diproses dalam Negara yang dipantau oleh Harwood. Isu Harwood adalah Pengesahan Sertifikat Clearance setelah pemeriksaan quota kayu gelondongan di kamp basis, balong akhir kayu gelondongan, poin transit dan pabrik berlisensi.
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Semua Pengolah Kayu	<b>Semenanjung Malaysia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resi dan tagihan penjualan</li> <li>Laporan analisa catatan pengunggahan kayu (Shuttle Return No IV)</li> <li>Laporan analisa catatan pabrik kayu lapis (Shuttle Return No V)</li> <li>Laporan analisa catatan pabrik pencetakan melalui Shuttle Return VII</li> <li>buku masukan kayu gelondongan</li> </ul>	Volume kayu memasuki pabrik dan produk kayu keluar dari pabrik harus dicatat sesuai dengan prosedur resmi.

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Semua Pengolah Kayu	<p><b>Sabah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resi dan tagihan penjualan</li> <li>Retur Produksi Bulanan</li> <li>buku masukan kayu gelondongan</li> </ul> <p><b>Sarawak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resi dan tagihan penjualan</li> <li>Laporan analisa catatan royalty penilaian kayu gelondongan untuk pemrosesan lokal</li> <li>Laporan analisa catatan penghapusan ijin jalan</li> <li>Laporan analisa catatan kapasitas terpasang industri berbasis kayu seperti ditunjukkan pada lisensi mereka</li> <li>Buku masukan kayu gelondongan</li> </ul>	Volume kayu memasuki pabrik dan produk kayu keluar dari pabrik harus dicatat sesuai dengan prosedur resmi.
Pengolahan	Tidak Berlaku	Pengolah	<p>Periksa bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan tentang karyawan dan hak-hak pekerja dan kesejahteraan</p> <p>Mencari konfirmasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan memenuhi semua undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku</li> <li>Perusahaan ini kompatibel dengan semua peraturan yang meliputi kesehatan dan keselamatan karyawan dan keluarga mereka</li> </ul>	Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft "Due Diligence Regulation" Uni Eropa
Ekspor	Legalitas Penjualan dan Ekspor	Perusahaan pengeksportir	<p>Semua eksportir harus mampu menghadirkan bukti sebagai berikut:</p> <p><b>Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Pendaftaran (Formulir 9) - Daftar dengan Komisi Perusahaan Malaysia (Suruhanjaya Syarikat Malaysia)</li> </ul> <p><b>Semenanjung Malaysia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisensi menurut jenis produk dan perusahaan dengan Departemen Kehutanan</li> <li>Daftar dengan MTIB Sabah</li> <li>Lisensi menurut jenis produk dan perusahaan dengan MTIB</li> <li>lisensi Departemen Kehutanan Sarawak</li> <li>Industri Kayu Sarawak lisensi ekspor kayu atau produk kayu Development Corporation (STIDC)</li> <li>Ijin CITES</li> </ul>	Perusahaan harus terdaftar secara hukum sesuai dengan hukum dan semua eksportir kayu, pemasok, pemroses, siswa kelas dan operator dermaga harus terdaftar di instansi terkait.

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Ekspor	Legalitas Penjualan dan Ekspor	Perusahaan pengeksportir	<p>Semua eksportir harus mampu menghadirkan bukti sebagai berikut:</p> <p><b>Semenanjung Malaysia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekaman account cess di MTIB untuk kayu gelondongan, kayu gergajian, kayu lapis, cetakan, veneer, partikel / chipboard dan block board</li> <li>• ijin ekspor Kayu yang dikeluarkan oleh MTIB</li> <li>• Formulir Departemen Bea Cukai K2</li> </ul> <p><b>Sabah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekaman account cess di MTIB untuk kayu gelondongan, kayu gergajian, kayu lapis, cetakan, veneer, partikel / chipboard dan block board</li> <li>• ijin ekspor Kayu yang dikeluarkan oleh MTIB</li> <li>• Formulir Departemen Bea Cukai K2</li> <li>• Faktur</li> <li>• Biaya royalti Negara</li> </ul> <p><b>Sarawak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat Clearance Ekspor Harwood yang menyetujui dokumen untuk ekspor kayu gelondongan</li> <li>• lisensi Ekspor STIDC</li> <li>• ijin Wildlife</li> <li>• lisensi CITES</li> <li>• Lisensi di Sepetir oleh Departemen Kehutanan</li> <li>• Formulir Departemen Bea Cukai K2</li> </ul>	Prosedur ekspor dan lisensi untuk kayu dan produk kayu harus sesuai dengan hukum yang relevan.
Ekspor	Pembayaran Biaya dan Royalti	Perusahaan pengeksportir	Perusahaan Impor dan ekspor harus menunjukkan setiap pembayaran Pajak Ekspor yang bertanggung jawab.	Semua pajak terkait dengan ekspor dan impor hasil hutan dibayar tepat waktu.

*Dokumen ini adalah untuk tujuan pendidikan dan informasi saja dan tidak dimaksudkan dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum. Orang mencari nasihat hukum mengenai kepatuhan dengan Lacey Act atau hukum lainnya, peraturan, atau persyaratan harus berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualitas.*



Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Pengelola Hutan / Perusahaan Pemanen dengan investasi milik pemerintah	Perusahaan harus telah menyetujui rencana panen dan peta	Manajemen dan rencana desain hanya dapat dikembangkan oleh organisasi terdaftar: Inventarisasi dan Institute Perencanaan Hutan (FIPI), Kolese teknik Kehutanan (FC), Perusahaan Hutan Negara berlisensi (SFE) dan organisasi-organisasi lokal yang memiliki ijin usaha yang ditentukan. Dalam kasus di mana perusahaan meminjam, dengan bunga, mulai dari pemerintah, rencana panen tersebut disetujui oleh salah satu DARD (bagi perusahaan-perusahaan milik provinsi) atau korporasi Vietnam Hutan (VINAFOR) dengan persetujuan MARD berikutnya.
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Pengelola Hutan / Perusahaan Pemanen dengan lahan hutan dan investasi 100% swasta	Tidak ada	<i>Perusahaan yang melakukan investasi sendiri tidak memerlukan ijin panen.</i>
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Pengelola Hutan / Perusahaan Pemanen	Data untuk semua pohon yang ditebang diperiksa dan kayu gelondongan dicap oleh Departemen Perlindungan Hutan	Rekaman pengecapan diselenggarakan oleh Departemen Perlindungan Hutan untuk penilaian pajak sumber daya alam dan untuk memberikan bukti asal.
Hutan	Hak Legal untuk Memanen	Pengelola Hutan / Perusahaan Pemanen	Untuk semua wilayah panen, perusahaan harus memiliki sebuah laporan pemeriksaan yang disetujui pasca panen	Pemilik hutan dan Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan melakukan evaluasi untuk mengukur aktual panen versus desain panen
Hutan	Pembayaran Biaya dan Royalti	Pengelola Hutan / Perusahaan Pemanen	Periksa penerimaan untuk membayar biaya yang berkaitan dengan rencana pengelolaan, rencana panen dan desain AMDAL & PPN.	Perusahaan harus menunjukkan bahwa semua pembayaran biaya karena (rencana pengelolaan, rencana panen dan desain AMDAL) dan pajak (pajak tanah dan pajak penggunaan sumber daya alam) telah dilakukan dengan lancar
Impor	Legalitas Impor	Semua pengolah kayu yang mengimpor kayu	Untuk kayu impor, perusahaan harus memiliki dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Semua dokumen yang diperlukan untuk ekspor hukum dari negara produsen</li> <li>Bea pernyataan otorisasi impor</li> <li>Departemen Perlindungan Hutan menyetujui dokumen transportasi kayu dari pelabuhan.</li> </ul>	Dokumen yang diperlukan untuk impor kayu harus yang terbarau dan benar
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Salinan dari lisensi pendaftaran ditempatkan di Departemen Transportasi tingkat provinsi.	Perusahaan pengangkutan dan individu harus memiliki lisensi untuk mengangkut kayu.

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen <i>Lacey Act</i>	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Operator harus memiliki dokumen lisensi yang valid: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pendaftaran Kendaraan tahun dan jenis kendaraan,</li> <li>• kapasitas beban Kendaraan</li> <li>• Dokumen yang menyatakan itu adalah milik perusahaan / kontraktor kapal atau truk.</li> </ul> <p>Dua ijin yang diperlukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan Badan Keamanan Umum untuk setiap kapal atau truk perusahaan atau individu yang beroperasi.</p>	Organisasi, individu kapal operasi atau truk untuk mengangkut hasil hutan dari hutan harus memiliki ijin yang relevan
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Semua kayu gelondongan sudah memiliki stempel Perlindungan Hutan Departemen yang benar cap (cat) tanda-tanda yang dapat dibaca. Cross referensi tanda dengan kata catatan resmi.	Semua kayu gelondongan yang diangkat dari daerah panen ditandai dengan stempel resmi
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Kayu gelondongan diangkat disertai oleh dokumentasi yang benar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• catatan Kayu benar ke format MARD</li> <li>• Dokumen memeriksa keaslian dari kayu yang diberikan oleh Departemen Perlindungan Hutan, atau sertifikat PC Kabupaten untuk kayu tidak dikenakan stamping, atau sertifikat Komune PC untuk kayu dari tanaman dan pohon berserakan.</li> </ul>	Perusahaan harus mencatat pengangkutan kayu gelondongan ke fasilitas pengolahan menggunakan dokumentasi resmi. Catatan: dokumentasi log dikeluarkan sebelum meninggalkan unit pengelolaan hutan, atau pada saat lelang negara.
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut – kayu yang dipanen di vietnam	Makalah yang dibutuhkan untuk transportasi hukum (dan penyimpanan dan pengolahan) kayu dalam negeri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• faktur penjualan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan (untuk kayu yang ditebang oleh perusahaan saja)</li> <li>• transportasi tagihan Ex-warehouse-cum-internal untuk transportasi internal</li> <li>• Kayu catatan (daftar kayu gelondongan) menurut format MARD</li> <li>• Perlindungan Resmi Dept Kehutanan catatan kayu st yang kompatibel dengan kayu konsinyasi.</li> </ul>	Perusahaan harus mencatat pengangkutan kayu gelondongan ke fasilitas pengolahan menggunakan resmi dokumentasi.  Catatan: dokumentasi log dikeluarkan sebelum meninggalkan unit pengelolaan hutan, atau pada saat lelang negara.
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut – kayu yang dipanen di luar	makalah impor kayu transportasi harus terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impor deklarasi atau sertifikasi dari bea cukai</li> <li>• catatan Kayu / daftar dikembangkan oleh negara pengekspor</li> <li>• peranko Polisi Hutan atau setara mereka dari negara pengekspor atau jika tidak ada, dari kantor Departemen Perlindungan Hutan pada titik impor.</li> </ul>	Di mana kayu impor dijual kembali, Departemen Keuangan faktur penjualan dan daftar kayu asli juga diminta, atau jika kiriman dibagi, daftar kayu FPDcertified harus disediakan.
Pengangkutan	Legalitas Kepemilikan dan pengangkutan	Pengangkut	Dokumen terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• faktur penjualan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau tagihan transportasi ex-warehouse-cum-internal untuk transportasi internal</li> <li>• Stempel pencatatan kayu merekam dan Perlindungan Hutan Departemen.</li> </ul>	Organisasi pengangkutan kayu olahan harus membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kendaraan transportasi

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Pengolah	<p>Verifikasi bahwa perusahaan memiliki dokumen-dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sertifikat pendaftaran bisnis</li> <li>• lisensi untuk beroperasi</li> <li>• lisensi untuk mengimpor</li> <li>• Lisensi untuk memproses komoditas untuk pedagang asing (yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan).</li> </ul>	<p>Fasilitas pengolahan kayu (dan perdagangan) memiliki sertifikat pendaftaran bisnis legal yang diperlukan untuk beroperasi, dan lisensi untuk memproses komoditas untuk pedagang asing (jika perlu). Sertifikat pendaftaran bisnis diberikan oleh salah satu Komite Rakyat (untuk bisnis rumah tangga) di tingkat kabupaten atau Departemen Perencanaan dan Investasi tingkat provinsi.</p>
Pengolahan	Legalitas untuk Memproses	Pengolah	<p>Pengolahan kayu dan fasilitas perdagangan memiliki buku kayu gelondongan untuk merekam semua kayu yang masuk atau keluar dari fasilitas tersebut.</p> <p>Perusahaan mempunyai kontrak penjualan untuk setiap transaksi dalam rantai pasokan ke fasilitas pengolahan.</p>	<p>Data kayu masuk dan keluar fasilitas tersebut harus dicatat dalam satu hari transaksi dan bentuk buku catatan yang disediakan dan dipandu oleh Departemen Perlindungan Hutan tingkat kabupaten faktur penjualan harus ditetapkan oleh Menteri Keuangan.</p>
Pengolahan	Pembayaran Biaya dan Royalti	Pengolah	<p>Konfirmasikan bahwa perusahaan menyimpan entri kayu gelondongan dan daftar produk keluar.</p>	
Semua	Tidak Berlaku	Semua	<p>Periksa bahwa perusahaan mempertahankan atau memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal / masyarakat adat sesuai dengan hukum dan peraturan.</p> <p>Mencari konfirmasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan telah menciptakan lapangan pekerjaan dan / atau generasi berpenghasilan bagi masyarakat lokal</li> </ul>	<p>Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft “<i>Due Diligence Regulation</i>” Uni Eropa. Ini adalah wajib untuk kasus-kasus yang melibatkan perusahaan pertanian Negara dan perusahaan hutan Negara.</p> <p>Catatan: untuk perusahaan lain indikator ini tidak wajib, kecuali di mana pemerintah daerah telah meletakkan kondisi pada alokasi lahan hutan di bawah yurisdiksinya.</p>
Pengolahan	Tidak Berlaku	Pengolah	<p>Periksa bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan tentang karyawan dan hak-hak pekerja dan kesejahteraannya. Mencari konfirmasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan memungkinkan karyawan untuk bergabung dengan serikat buruh yang diakui dan dapat menunjukkan bahwa ia tidak melakukan diskriminasi terhadap anggota serikat pekerja ketika membuat keputusan kerja</li> <li>• Bila diminta oleh serikat pekerja yang diakui yang mewakili karyawan, Perusahaan bersedia mengadakan perundingan dengan serikat pekerja dan menghormati semua kesepakatan yang dicapai</li> <li>• Perusahaan membayar gaji karyawan dan menyediakan mereka imbalan yang sesuai dengan peraturan nasional</li> <li>• Perusahaan menerapkan prosedur keselamatan yang jelas, mempertahankan peraturan tentang tanggung jawab penggunaan bahan kerja dan menjamin sanitasi sesuai yang ditentukan oleh peraturan tenaga kerja nasional</li> <li>• Perusahaan menjamin bahwa semua karyawan berumur 15 tahun keatas</li> </ul>	<p>Ini adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi Draft “<i>Due Diligence Regulation</i>” Uni Eropa</p>

Tahap dalam Rantai Pasokan	Komponen Lacey Act	Penerapan Hukum	Dokumen untuk Diperiksa	Catatan untuk Diingat
<b>Ekspor</b>	<b>Legalitas Penjualan dan Ekspor</b>	<b>Eksportir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan menjamin bahwa semua peralatan keamanan dan darurat pertolongan pertama yang diperlukan tersedia dan mudah diakses untuk digunakan di tempat kerja masing-masing</li> <li>Perusahaan harus menyediakan pekerja dengan asuransi sosial yang menanggung kecelakaan dan penyakit di tempat kerja</li> <li>Perusahaan menyediakan pekerja dengan kontrak kerja yang legal dan sesuai dengan ketentuan yang terkandung di dalamnya</li> <li>Perusahaan menyediakan pensiun atau tunjangan lump sum, atau tunjangan terpisah atas pemutusan kontrak kerja dengan pekerja</li> <li>Perusahaan tidak memerlukan karyawan untuk bekerja lebih dari 8 jam (atau 6-7 dalam beberapa kasus) jam per hari, membayar karyawan sesuai dengan tarif lembur yang benar dan memungkinkan setiap karyawan untuk mengambil cuti tahunan di samping libur resmi</li> <li>Perusahaan memiliki peraturan internal pada kerja praktek</li> </ul>	
<b>Ekspor</b>	<b>Legalitas Penjualan dan Ekspor</b>	<b>Eksportir</b>	<p>Perusahaan harus terus memegang hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sertifikat pendaftaran bisnis yang terbaru</li> <li>kode Pajak</li> <li>lisensi Impor atau ekspor (yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan).</li> </ul>	Perusahaan harus memiliki sertifikat legal pendaftaran usaha yang diperlukan dan lisensi impor dan ekspor untuk beroperasi. Sertifikat pendaftaran bisnis diberikan oleh salah satu dari Komite Rakyat tingkat kabupaten (untuk bisnis rumah tangga) atau Departemen Perencanaan dan Investasi tingkat provinsi.
<b>Ekspor</b>	<b>Legalitas Penjualan dan Ekspor</b>	<b>Eksportir</b>	<p>Eksportir harus memiliki dokumen yang sah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bill of lading</li> <li>daftar pengemasan untuk kayu gergajian atau produk kayu</li> <li>catatan rantai penjagaan (yang mencakup dokumen transportasi) menunjukkan asal usul kayu yang digunakan untuk menghasilkan produk kayu.</li> </ul>	<p>Dokumen ekspor harus valid dan <i>up to date</i>.</p> <p>Ini adalah hal yang ilegal untuk ekspor kayu gelondongan atau kayu gergajian yang berasal dari hutan alam dalam negeri.</p>
<b>Ekspor</b>	<b>Legalitas Penjualan dan Ekspor</b>	<b>Eksportir</b>	<p>Dokumen sebagai berikut diperlukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tarif dibayar dengan sesuai dan telah ada bukti penerimaan.</li> <li>Lisensi / sertifikasi untuk spesies yang tercantum di CITES adalah akurat</li> <li>sertifikat impor / ekspor yang diterbitkan oleh MARD (Otoritas Manajemen Vietnam CITES) berlaku</li> <li>sertifikat karantina diberikan oleh badan karantina tanaman.</li> </ul>	Kondisi yang telah ditetapkan yang ada didaftar CITES, spesies tarif, persyaratan phytosanitary dan karantina, kuota, produk dan persyaratan khusus yang diikuti. Ada batas kayu dari hutan alam untuk ekspor sebagai produk seni rupa. Hal ini dikeluarkan oleh Ketua Komite Rakyat untuk perusahaan tingkat provinsi.
<b>Ekspor</b>	<b>Pembayaran Biaya dan Royalti</b>	<b>Eksportir</b>	<p>Bukti penerimaan sebagai berikut diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PPN</li> <li>pajak Impor / Ekspor</li> <li>Pajak pendapatan</li> </ol>	Eksportir harus menunjukkan bahwa pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), impor / pajak ekspor (jika sesuai) dan pajak penghasilan telah dibayar dan <i>up to date</i> .

*Dokumen ini adalah untuk tujuan pendidikan dan informasi saja dan tidak dimaksudkan dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum. Orang mencari nasihat hukum mengenai kepatuhan dengan Lacey Act atau hukum lainnya, peraturan, atau persyaratan harus berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkualitas.*



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



## PROGRAM USAID KEHUTANAN DAN PERDAGANGAN ASIA YANG BERTANGGUNG JAWAB (USAID RESPONSIBLE ASIA FORESTRY AND TRADE (RAFT) PROGRAM)

Kawasan Asia Pasifik, rumah bagi setengah populasi planet ini, adalah produsen dan pemroses terbesar kayu tropis di dunia. Wilayah ini menghadapi meningkatnya permintaan internasional untuk produk hutan kayu dan non-kayu. Permintaan ini diperkirakan meningkat di tahun-tahun mendatang, memberikan tekanan yang lebih besar terhadap hutan alam memperburuk dampak negatif sosial dan lingkungan. Program RAFT, diluncurkan oleh The Nature Conservancy dan berbagai kelompok mitra pelaksana dengan dukungan dari US Agency for International Development Regional Development Mission for Asia (USAID RDMA) menyajikan respon menyeluruh untuk penebangan hutan dan degradasi hutan yang terus-menerus di wilayah ini.

RAFT adalah program lima tahun (Oktober 2006 - September 2011) dirancang untuk meningkatkan pengelolaan hutan dan praktek perdagangan kayu di Asia sehingga mengurangi emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dari penebangan hutan dan degradasi hutan. Program ini memiliki empat tujuan:

1. Meningkatkan praktek-praktek pengelolaan hutan
2. Meningkatkan perdagangan produk kayu dari sumber yang legal
3. Memperkuat kerjasama regional dalam pengelolaan hutan dan perdagangan produk kayu
4. Meningkatkan kapasitas daerah untuk menggabungkan pengelolaan hutan berkelanjutan ke dalam sebuah kerangka REDD internasional yang muncul

RAFT diimplementasikan oleh sebuah kemitraan yang melibatkan involving The Forest Trust (TFT), IUCN-the International Union for Conservation of Nature, The Nature Conservancy (TNC), RECOFTC-The Center for People and Forests, the Tropical Forest Foundation (TFF), TRAFFIC-the Wildlife Trade Monitoring Network, dan the World Wide Fund for Nature (WWF). RAFT beroperasi di Kamboja, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Papua Nugini, Thailand dan Vietnam.

[www.raftprogram.org](http://www.raftprogram.org)



**GLOBAL  
FOREST  
& TRADE  
NETWORK**

### WWF'S GLOBAL FOREST & TRADE NETWORK (GFTN)

**GFTN adalah inisiatif WWF untuk mengeliminasi penebangan ilegal dan mengubah pasar global menjadi suatu usaha untuk menyelamatkan hutan dunia yang paling berharga dan terancam.**

Dengan memfasilitasi hubungan perdagangan antara perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk mencapai dan mendukung kehutanan yang bertanggung jawab, GFTN menciptakan kondisi pasar yang membantu melestarikan hutan dunia sambil memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi bisnis-bisnis dan orang-orang yang bergantung pada mereka. GFTN menganggap independen, sertifikasi hutan berbasis multi-stakeholder sebagai alat vital dalam perkembangan ini dan membantu menanamkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan praktek perdagangan di seluruh rantai pasokan.

[gftn.panda.org](http://gftn.panda.org)

WWF adalah salah satu organisasi terbesar dunia dan paling berpengalaman di bidang konservasi independen, dengan hampir 5 juta pendukung dan sebuah jaringan global yang aktif di lebih dari 100 negara.

Misi WWF adalah untuk menghentikan degradasi lingkungan alam planet ini dan untuk membangun masa depan dimana manusia hidup dalam harmoni dengan alam, dengan cara:

- Melestarikan keanekaragaman hayati di dunia
- Memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dapat berkelanjutan
- Mempromosikan pengurangan polusi dan konsumsi boros.



**GLOBAL  
FOREST  
& TRADE  
NETWORK**

**WWF International**

Avenue du Mont-Blanc  
1196 Gland Switzerland

Tel : +41 22 364 9111 Fax : +41 22 364 6040

Email : [gftn@wwf.panda.org](mailto:gftn@wwf.panda.org) [gftn.panda.org](http://gftn.panda.org)



Printed on recycle paper